

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2006-2015**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis  
Islam

**Oleh:**

**DIAN KURNIAWAN**

**NPM : 1451010166**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H/2018 M**

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA TAHUN 2006-2015**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas Dan Memenuhi Syarat – syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing I : Vitria Susanti, M.A., M.Ec. Dev

Pembimbing II : M. Kurniawan, M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Implementasi desentralisasi fiskal berimplikasi pada transfer pusat melalui dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Transfer pusat tersebut menjadi faktor penting dalam dinamika pembangunan daerah yang akan berperan dalam mempengaruhi kinerja perekonomian. Peningkatan dana perimbangan yang meliputi DBH, DAU, DAK, dapat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah

Rumusan masalah adalah bagaimana dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2006-2015 secara parsial dan secara simultan, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Utara dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Utara baik secara parsial maupun secara simultan, serta bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap pertumbuhan ekonomi .

Jenis dan sumber data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang berupa data *time series* dengan rentang waktu 10 tahun mulai dari tahun 2006 hingga 2015. Variabel penelitian terdiri dari variabel Dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y) dan variabel Independen yaitu dana bagi hasil (X1), dana alokasi umum (X2) dan dana alokasi khusus (X3). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis *regresi linear berganda*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan DBH, DAU, DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan DAU, dan DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan oleh DAU dan DAK kurang mencerminkan pembentukan pada PDRB disektor basis, industri, perdagangan dan jasa. Dana yang diterima pemerintah lebih banyak untuk pemenuhan belanja tidak langsung aparatur dan sebagian lagi pemenuhan infrastruktur jalan. Islam memandang pertumbuhan ekonomi merupakan suatu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan yang kekal serta Pertumbuhan ekonomi harus menekankan aspek aksiologis yang lebih menjunjung tinggi nilai dan moral yang tujuan kepada pertumbuhan ekonomi yang ada tidak hanya kesejahteraan materi tetapi lebih diorientasikan kepada kesejahteraan dunia akhirat.

**Kata kunci :** Dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), Pertumbuhan ekonomi (PDRB)





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp.0721-703260

### PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI TINJAU DARI  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA TAHUN 2006-2015

Nama : Dian Kurniawan

NPM : 1451010166

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

### DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Vitria Susanti, M.A., M.Ec. Dev  
NIP. 19780918 200501 2 005

  
Muhammad Kurniawan, M.E., Sy  
NIP. 19860517 201503 1 005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah

  
Madnasir, S.E., M.Si

NIP. 19750424 200212 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp.0721-703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006-2015", disusun oleh Nama : Dian kurniawan, NPM.1451010166, Program Studi Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : Jum'at 21 Desember 2018

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang : Drs. H. Nasrudin, M.Ag.

Sekretaris : Dinda Fati Rifan, M.Ak.

Penguji I : Muhammad Iqbal, M.E.I.

Penguji II : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy.

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag

NIP. 19580824 198903 1003



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S.An-nissa:58)*<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung : Dipnegoro,2010), h.69

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang serta rahmatnya, memberikan kemudahan kepada penulis, sholawat beriringan salam selalu penulis sampaikan kepada tokoh panutan alam Nabi Muhammad SAW. Dari hati penulis yang paling dalam Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang yang kuharapkan ridhonya, yaitu kedua orang tuaku Ayahanda Saud dan Ibunda Masiah Indrayani yang tercinta, yang telah membesarkanku yang tidak henti-hentinya mendo'akan demi keberhasilanku. Dan pengorbanannya yang ikhlas, baik secara moril maupun materi semoga Allah SWT memuliakan keduanya baik di dunia maupun di akhirat, Aamiin.
2. Saudara-saudaraku tersayang: Kakakku Yogi Febri , dan adikku tersayang Marisa Putri yang selalu memotivasi dan mendo'kanku.
3. Sahabat-sahabatku: Arif Nurhidayat, Alfin Muqsit, agus mulato, Fajar Setiono, Irfantri Mahaputra , Megi Mirza, M.Aji Ridwan Mas, dan Yayan Amroni dan yang terkhusus Sudarni Chomsyatun serta keluarga Ekonomi Syariahkelas D angkatan 2014, berkat semangat dan kebersamaan selama empat tahun kuliah, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung. Khususnya kepada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islamjurusan ekonomi syariah tempat penulis menuntut ilmu.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Dian Kurniawan, dilahirkan pada tanggal 15 Desember 1995, anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah bernama Saud dan Ibu bernama Masiah Indrayani.

Sebelum masuk kejenjang Perguruan Tinggi penulis mengenyam Pendidikan TK PGRI selama 1 tahun dan lulus pada tahun 2002, kemudian penulis masuk kejenjang Sekolah Dasar di SD N 1 Tanjung Baru Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, menempuh pendidikan selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Bukit Kemuning Lampung Utara, selesai pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan di SMA PGRI Bukit kemuning Kabupaten Lampung Utara dan selesai pada tahun 2014.

Setelah selesai pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2014, Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) mengambil program studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2014 yang diterima melalui jalur UMPTKIN.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

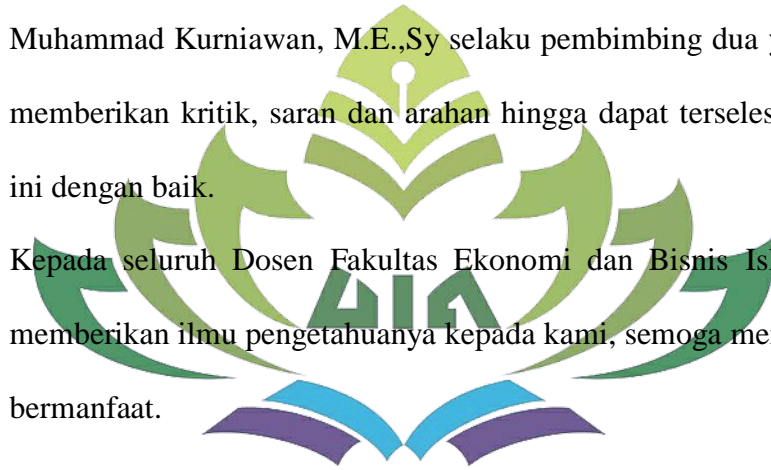
Segala puji bagi Allah SWT, rabb semesta alam. Dialah dzat yang menggenggam setiap nyawa setiap makhluk-Nya. Tanpa-Nya semesta alam beserta isinya ini akan binasa. Karena Dialah yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsi dan fungsinya.

Shalawat salam selalu tercurah limpahkan kepada pemimpin umat, Nabiullah Muhammad SAW. Beliau sukses mengubah masyarakat jahiliyah menjadi sosok yang cerdas secara spiritual, dari masyarakat yang berperangai kasar menjadi masyarakat yang santun, dan dari masyarakat yang tidak dikenal oleh peradaban menjadi umat yang memimpin peradaban. Semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Kiyamah kelak, Amin.

Alhamdulillah, masa kuliah Strata satu dengan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah dilalui dengan baik dan kini telah tiba pada tahap penyelesaian tugas akhir guna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Pada penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh masa studi. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Bahruddin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ekonomi Islam dengan baik dan lancar.
3. Ibu Vitria Susanti, M.A., M.Ec.,Dev selaku pembimbing satu dan bapak Muhammad Kurniawan, M.E.,Sy selaku pembimbing dua yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikanya skripsi ini dengan baik.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuanya kepada kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.



Semoga segala amal perbuatan baik kita dibalas oleh Allah SWT, dan apa yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait. Selanjutnya penulis mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf baik perkataan maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak dan kepada Allah SWT kami mohon ampunan.

Demikian pengantar dari kami, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dan kemajuan



bersama. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Bandar Lampung,      Desember, 2018

Penulis



**Dian Kurniawan**

**NPM 1451010166**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan judul .....	1
B. Alasan memilih judul .....	3
C. Latar Belakang .....	4
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	13
 <b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	
A. Otonomi Daerah .....	15
1. Definisi Otonomi Daerah .....	15
2. Penerapannya otonomi daerah di Indonesia.....	17
B. Desentralisasi Fiskal .....	17
1. Definisi Desentralisasi Fiskal.....	17
2. Indikator Desentralisasi Fiskal .....	18
3. Desentralisasi Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	21
C. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah .....	25
1. Pendapatan Asli Daerah .....	25
2. Dana Perimbangan .....	27
3. Pinjaman Daerah .....	28
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah.....	29



5. Pendapatan Asli Daerah Dalam Konsep Ekonomi Islam.....	30
D. Pertumbuhan Ekonomi .....	36
1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi.....	36
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi .....	38
3. Indikator Pertumbuhan Wilayah .....	40
4. Teori Pertumbuhan.....	45
5. Proses Pertumbuhan Ekonomi .....	49
6. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Konsep Ekonomi Islam .....	58
E. Penelitian Terdahulu.....	76
F. Hubungan Antar Variabel Dan Pengembangan Hipotesis .....	78
G. Kerangka Berfikir .....	83

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	86
B. Sumber Data .....	87
C. Teknik Pengumpulan data .....	87
D. Populasi dan sample .....	88
E. Devinisi Operasional variabel .....	89
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	91
1. Uji Asumsi Klasik .....	91
2. Pengujian Hipotesis.....	94
3. Uji Regresi Linier Berganda .....	96

### **BAB IV. PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Hasil Penelitian.....	98
1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	98
2. Sejarah Kabupaten Lampung Utara .....	98
3. Geografi Kabupaten Lampung Utara .....	99
4. Sektor Ekonomi Kabupaten Lampung Utara .....	100
B. Gambaran Hasil Penelitian .....	101
C. Analisis Data.....	106
1. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	106
2. Analisis Regresi Linier Berganda .....	111
3. Koefisien Determinasi.....	112
4. Hasil Uji Simultan F.....	113
5. Uji Signifikan Uji Statistik T .....	114
D. Pembahasan .....	115
1. Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara Parsial .....	115
2. Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara simultan .....	125

3. Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara tahun 2006-2015 .....	127
--	-----

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	136
B. Saran .....	138

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus Provinsi Lampung tahun 2011-2016.....	7
Tabel 1.2	Laju pertumbuhan PDRB provinsi Lampung berdasarkan Kabupaten /kota atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2011-2014 .....	9
Tabel 3.1	Definisi operasional Variabel.....	90
Tabel 4.1	PDRB Kabupaten Lampung Utara atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha .....	102
Tabel 4.2	Realisasi dana bagi hasil tahun 2006-2015 .....	103
Tabel 4.3	Realisasi dana alokasi umum tahun 2006-2015 .....	105
Tabel 4.4	Realisasi dana alokasi khusus tahun 2006-2015 .....	106
Tabel 4.5	Hasil Uji normalitas .....	107
Tabel 4.6	Hasil Uji multikolinieritas.....	108
Tabel 4.7	Hasil Uji autokorelasi.....	109
Tabel 4.8	Hasil pengujian Adjusted Square .....	111
Tabel 4.9	Hasil ringkasan analisis Regresi linier berganda .....	111
Tabel 4.10	Realisasi dana bagi hasil tahun 2006-2015 .....	116
Tabel 4.11	Realisasi pengeluaran kabupaten Lampung Utara 2010-2014.....	118
Tabel 4.12	Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara 2006-2015 .....	119
Tabel 4.13	Realisasi dana alokasi umum .....	121
Tabel 4.14	Realisasi dana alokasi khusus .....	125
Tabel 4.15	PDRB Kabupaten Lampung Utara atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha .....	130
Tabel 4.16	Total pendapatan perkapita Kabupaten Lampung Utara 2006-2015 .....	134

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	85
Gambar 4.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	110



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Jumlah realisasi dana bagi hasil tahun 2006-2015
2. Data jumlah realisasi dana alokasi umum tahun 2006-2015
3. Data jumlah realisasi dana alokasi khusus tahun 2006-2015
4. Data PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha 2006-2015
5. Hasil Uji Normalitas
6. Hasil Uji Multikolinearitas
7. Hasil Uji Autokorelasi
8. Hasil Uji Heteroskedastisitas
9. Hasil Uji T
10. Hasil Uji F
11. Hasil Analisis Regresi Berganda
12. Table T
13. Tabel F
14. SK Pembimbing
15. Berita Acara Munaqosah
16. Surat Pernyataan Plagiarisme
17. Berita Acara Seminar Proposal



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan Skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, di hadapan tidak akan terjadi kesalahan pahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul : “ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006 – 2015”. Untuk itu di perlu diuraikan pengertian dari penegasan judul tersebut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya<sup>1</sup>.
2. Dampak adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat baik negatif ataupun positif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama cetakan ke-empat, 2011), h.58

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 68

3. Desentralisasi fiskal diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.<sup>3</sup>
4. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.<sup>4</sup>
5. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau bisa juga biasa diartikan sebagai cara pandang.<sup>5</sup>
6. Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip – prinsip dan nilai-nilai al-quran dan sunnah.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali yang dimaksud dalam skripsi ini adalah terkait dengan penerimaan daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang setiap tahun

---

<sup>3</sup> Sandi Hidayat Noor, Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Jawa Timur, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2 No. 1, Januari 2016

<sup>4</sup> Arsyad Lincoln, “*Ekonomi Pembangunan*” (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010) h. 277

<sup>5</sup> Depatemen Pendidikan Nasional, *ibid.*, h. 675

<sup>6</sup> P3EI. *Ekonomi islam* (Jakarta: rajawali pers, 2011), h. 19

mengalami naik turun dan PDRB yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi akan tetapi masih belum stabil setiap tahunnya. Hal ini berbeda dengan teori Adam Smith, akumulasi modal akan menentukan cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan dana perimbangan dan dana pendapatan asli daerah, pemerintah daerah di wilayah kabupaten Lampung Utara dituntut untuk mampu mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif, sehingga diharapkan akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

## **B. Alasan memilih judul**

### **1. Alasan Objektif**

Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, pemerintah daerah di wilayah kabupaten Lampung Utara dituntut untuk mampu mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif, sehingga diharapkan akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah. PDRB yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu pertumbuhan ekonomi yang dimana setiap tahun pada Kabupaten Lampung Utara nilainya belum stabil, ini bisa dilihat dari penerimaan



daerah yang berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang setiap tahun naik, Kenaikan dana perimbangan tetapi pada kenyataannya tidak memberikan efek yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi dikabupaten Lampung Utara. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Lampung Utara, ternyata belum mampu membawa perubahan penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi baru sebatas mampu memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada dan tidak signifikan. Seharusnya dengan desentralisasi fiskal yang dilakukan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi dan lebih stabil. Hal ini berbeda dengan teori Adam Smith yang menyatakan, akumulasi modal akan menentukan cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.

## **2. Alasan Subjektif**

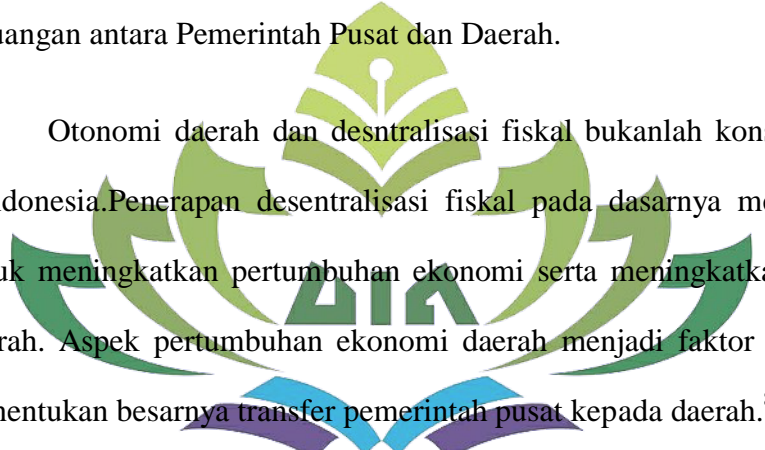
Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan serta di dukung oleh tersedianya data-data dan literature yang dibutuhkan. Disamping itu, penelitian yang penulis lakukan ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi menunjukan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu yang menggunakan Indikator tingkat pertumbuhan

produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian.<sup>7</sup>

Indonesia memasuki awal Era baru Otonomi Daerah dengan diterapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukanlah konsep yang baru diindonesia. Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan daerah. Aspek pertumbuhan ekonomi daerah menjadi faktor penting untuk menentukan besarnya transfer pemerintah pusat kepada daerah.<sup>8</sup>

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang diwarnai dengan fenomena pemekaran wilayah diindonesia, implementasi desentralisasi fiskal diprovinsi Lampung juga ditandai dengan fenomena pemekaran wilayah dalam jumlah yang relatif signifikan, dimana hampir seluruh kabupaten diprovinsi Lampung dilakukan pemekaran wilayah hingga saat ini provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota.

---

<sup>7</sup>Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan* (Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia,1994), h.2

<sup>8</sup> Muhammad said, Hamzah Abu Bakar, Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2 No.3, Agustus 2014

Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif<sup>9</sup>. Bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik, mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 kemudian direvisi menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.<sup>10</sup> Era otonomi daerah tidak sekedar menjalankan intruksi dari pusat, tapi benar-benar mempunyai kekuasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi

---

<sup>9</sup>Widiyarta, Agus. Desentralisasi Fiskal Dalam Pendanaan Pembangunan Daerah, Vol.2 No. 2. Januari 2003

<sup>10</sup> Suciayu dwi, Wibawa fahmi, Desentralisasi Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Yogyakarta , *Jurnal Ekonomi*, vol. 1 no. 1 april 2012



ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan tetapi terkait dengan kemampuan daerah.<sup>11</sup>

Dengan bertambahnya wilayah administrasi di provinsi lampung, ditambah dengan pemberian wewenang yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengurus pemerintahan, yang diiringi penyerahan pemberian dana untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, maka jumlah dana dari pemerintah pusat yang mengalir ke pemerintah daerah di wilayah provinsi lampung dalam bentuk dana perimbangan juga semakin meningkat sebagai terlihat pada tabel 1 realisasi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada tahun 2011-2016.

**Tabel 1.1**  
**Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus**  
**Provinsi Lampung tahun 2011 – 2016 (dalam juta rupiah)**

No	Tahun	Dana bagi hasil	Dana alokasi umum	Dana alokasi khusus
1	2011	251.104.117	769.973.038	42.210.200
2	2012	310.624.594	939.139.287	31.087.640
3	2013	263.272.124	106.066.3	601.082.30
4	2014	142.641.116,8	113.605.304,1	488.516.20
5	2015	239.008.513	1.097.129.439	245.066.400
6	2016	185.475.997	1.321.679.032	1.651.557.871

Sumber data ; BPS Provinsi lampung (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas jumlah dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus setiap tahunnya masih mengalami naik turun. Dana bagi hasil tertinggi pada tahun 2012 sedangkan 4 tahun terakhirnya

<sup>11</sup>Fitrah Afrizal, Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi (Makasar,2012),h.12

mengalami penurunan, sedangkan dana alokasi umum pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan yang cukup besar tetapi tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat signifikan dan pada dana alokasi khusus kenaikannya sangat signifikan terjadi pada tahun 2016 dengan tidak stabilnya dana yang diberikan kepada daerah akan menentukan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Hal ini berbeda dengan teori Adam Smith, akumulasi modal akan menentukan cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Proses pembentukan modal menghasilkan kenaikan output nasional dalam berbagai cara, dengan modal pemerintah dapat menyediakan faktor-faktor produksi. Dengan peningkatan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Lampung Utara dituntut untuk mampu mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif, sehingga diharapkan akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat namun harapan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal, terdapat fenomena menarik dari perekonomian daerah di Kabupaten Lampung Utara yaitu kondisi makro ekonomi daerah kabupaten Lampung Utara pasca pelaksanaan desentralisasi fiskal yang menunjukkan gejala yang relatif baik jika dibandingkan dengan sebelum desentralisasi fiskal. Terdapat beberapa

indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah, salah satunya dilihat dari pertumbuhan output perekonomian daerah yang tercermin dari pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten yang tingkat pertumbuhan ekonominya masih fluktuatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Lampung, jumlah PDRB atas dasar harga konstan yang dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut ini :

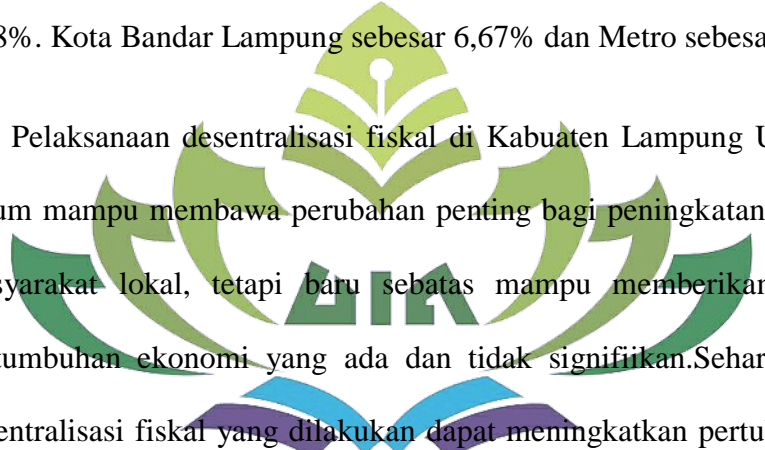
**Tabel 1.2**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi**  
**lampung berdasarkan kabupaten/kota Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha tahun 2011 – 2014 (dalam persen)**

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	
1	Lampung Barat	6.67	4.72	7.02	5.57	5.995
2	Tanggamus	5.87	9.19	5.83	5.78	6.6675
3	Lampung Selatan	5.81	5.96	6.15	6	5.98
4	Lampung Timur	5.57	4.24	8.05	2.74	5.15
5	Lampung Tengah	6.02	5.95	6.17	5.63	5.9425
<b>6</b>	<b>Lampung utara</b>	<b>5.38</b>	<b>5.64</b>	<b>5.95</b>	<b>5.93</b>	<b>5.725</b>
7	Way Kanan	5.31	5.55	5.05	5	5.2275
8	Tulang Bawang	5.24	5.29	5.56	6.63	5.68
9	Pesawaran	5.52	5.87	5.7	5.21	5.575
10	Pringsewu	6.2	6.44	6.15	5.84	6.1575
11	Mesuji	4.93	5.57	5.52	5.38	5.35
12	Tulang Bawang Barat	5.03	5.57	5.72	5.38	5.425
13	Pesisir Barat	-	-	5.02	4.69	4.855
14	Bandar Lampung	6.29	6.65	6.77	6.97	6.67
15	Metro	6.04	6.69	6.77	6.46	6.49

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2015



Berdasarkan keterangan pada tabel diatas bahwa laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2011-2014 terjadi peningkatan tetapi tidak signifikan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang fluktuatif setiap tahunnya tetapi pada kenyataannya tidak memberikan efek yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Utara ini bisa dilihat dari PDRB yang meningkat tetapi masih berada dibawah Kabupaten Lampung Selatan yang laju pertumbuhan produk domestik regional bruto sebesar 5,98%. Kota Bandar Lampung sebesar 6,67% dan Metro sebesar 6,49%.



Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Lampung Utara, ternyata belum mampu membawa perubahan penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi baru sebatas mampu memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada dan tidak signifikan. Seharusnya dengan desentralisasi fiskal yang dilakukan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi dan lebih stabil.

Jika melihat penelitian yang dilakukan di Provinsi Aceh dan Yogyakarta tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi ternyata penerapan desentralisasi fiskal berpengaruh tetapi tidak signifikan, jika melihat dari kegunaannya dana alokasi umum digunakan untuk belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur akan tetapi daerah dana alokasi umum digunakan untuk kepentingan belanja pegawai, akibatnya belanja untuk infrastruktur dinomorduakan dana bagi hasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dan dana

alokasi umum, sedangkan dana bagi hasil dana alokasi khusus diperuntukan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal dan untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>12</sup>

Desentralisasi dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dan keputusan pengeluaran yang benar akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan di daerah khususnya kabupaten Lampung Utara, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana efektifitas pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dalam memobilisasi sumber – sumber pendapatan daerah dan mengalokasikan dana tersebut pada sektor – sektor yang penting atau membutuhkan dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi daerah mampu berotonomi, yaitu terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Berkaitan dengan itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari dana bagi

---

<sup>12</sup>*Op.Cit*, Muhammad Said, Hamzah Abu Bakar, h. 26

hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, daerah akan mampu melaksanakan pembangunan didaerahnya masing-masing.<sup>13</sup>

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang terus –menerus dari faktor-faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan.<sup>14</sup> Dalam Islam, kesejahteraan tersebut dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dapat dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk.

Menurut Islam, semua jenis pendapatan dimasukkan ke dalam *bait al-mal*, lalu digunakan pada dua jenis penyaluran, anggaran untuk kesejahteraan dan anggaran untuk umum. Adapun anggaran untuk umum berasal dari pendapatan lainnya, seperti pajak dan non-pajak. Islam lebih terfokus pada kesejahteraan masyarakatnya daripada pertumbuhan ekonomi semata. Dalam pengelolaan agama Islam pemerintah sebaiknya mendahulukan kepentingan syariah daripada pertimbangan negara yang bersifat keduniaan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Arda Riski, Dini Habsari, “Pengaruh Pendapatan Hasil Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2012)” *Jurnal e-proceeding of management* Vol. 2 No. 3, Tahun 2015

<sup>14</sup> Almizan, “Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Vol. 1 No. 2, Tahun 2016

<sup>15</sup> Nurul Huda, “*Keuangan Publik Islam*” Pendekatan Teoritis dan Sejarah (Jakarta : Kencana, 2012), h.188

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “**Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Lampung Utara Pada Tahun 2006-2015**”.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara selama tahun 2006-2015?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara selama tahun 2006-2015?
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara selama tahun 2006-2015?
4. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara selama tahun 2006-2015?
5. Bagaimanakah pandangan ekonomi Islam mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara?

#### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan ekonomi Islam mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara



## 2. Manfaat penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai pembelajaran dan sarana untuk mendalami pengetahuan mengenai pengaruh desentralisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- 2) Diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam melihat pengaruh desentralisasi fiskal guna untuk pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lampung utara.
- 2) Menjadi saran untuk pemerintah sehingga dapat menjadikan penelitian ini sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan saran dalam menindaklanjuti kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Otonomi daerah

##### 1. Definisi otonomi daerah

istilah otonomi Secara etimologi berasal dari bahasa atau kata latin yaitu “*autos*” yang berarti “sendiri” dan “*nomos*” yang berarti “aturan”. Sehingga otonomi diartikan “pengundangan sendiri”, mengatur atau memerintah sendiri.<sup>1</sup> Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Sesuai dengan revisi undang – undang nomor 22 tahun dan 25 1999 yang direvisi yang menjadi undang – undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 dengan sejumlah perubahan mendasar yang bernuansa sentralis, maka perubahan seharusnya untuk mengembalikan semangat kemandirian daerah sebagaimana yang tercantum dalam undang- undang nomor 22 dan 25 tahun 1999. Paradigma yang seharusnya dianut dalam proses revisi

---

<sup>1</sup> Hadi Sasana, “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dikabupaten/Kota Provisi Jawa Tengah” *Dinamika Pembangunan*, Vol. 3 No. 2, 2006), H. 146

undang- undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 adalah pembangunan nasional harus dilakukan berdasarkan perspektif masyarakat di daerah, bukan sebaliknya dilakukan atas perspektif pemerintah pusat.<sup>2</sup>

Dari pemaparan diatas dapat dinyatakan bahwa otonomi daerah yang merupakan kemandirian daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah, kemandirian disini adalah kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah hendaknya mendorong dan memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, menumbuhkan peranserta masyarakat dan kreatifitas masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : adanya kemampuan dibidang ekonomi yang cukup memadai, adanya sumber daya manusia ang handal, memiliki sumber daya alam yang memadai, adanya dukungan bidang pertahanan dan keamanan daerah. Hal-hal ini perlu diperhatikan karena sejatinya otonomi daerah memberikan kesempatan pada daerah untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki sebagai kesinambungan pembangunan nasional.

---

<sup>2</sup> Jusuf SK, *Otonomi Daerah Dipersimpangan Jalan* (Jakarta : Cetakan Kedua Pustaka Spirit, 2012), h. 29

## 2. Penerapan Otonomi Daerah Di Indonesia

Otonomi daerah di Indonesia mulai dikenal dengan diundangkannya UU no.5 tahun 1974 yang ditujukan untuk “membangun otonomi daerah yang benar-benar nyata dan bertanggung jawab”. Hal ini wajar mengingat untuk negara dengan wilayah sedemikian luas. Pemerintah pusat yang kuat dan otonomi secara bersama-sama merupakan kebutuhan untuk menjamin tercapainya pembangunan.<sup>3</sup>

Rezim desentralisasi dan otonomi yang semula yang menjurus kesentralisasi menjadi bentuk baru desentralisasi melalui sejumlah perundang-undangan terutama melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 kemudian di revisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah hingga saat ini diterapkan di Indonesia.

### B. Desentralisasi Fiskal

#### 1. Definisi Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan

---

<sup>3</sup> Yuli Adriansyah, “Menuju Desentralisasi Kebijakan Ekonomi Dalam Islam: Pengalaman Dinasti ‘Usmaniyyah Abad 16-18 M Dan Indonesia Dimasa Orde Baru” (*Jurnal Al-Amwal* Vol.9 No.1, 2017), H. 8-9



publik sesuai dengan banyaknya kewenangan dibidang pemerintah yang diwenangkan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu perinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivative dari kebijakan otonomi daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah.

## 2. Indikator Desentralisasi Fiskal

Untuk mengukur desentralisasi fiskal disuatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah<sup>5</sup>. Ebel dan Yilaz, menyatakan terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi anatar negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun sama-sama menggunakan variabel yang pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (*size variable*) yang digunakan oleh peneliti yang satu

<sup>4</sup> Hadi Sasana, "Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dikabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah" ( *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 3 No. 2 Desember 2006), H. 147

<sup>5</sup> Dampak Desebtralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Wilayah Studi Kasus Jawa Barat, [Www.Academia.Edu/524078](http://Www.Academia.Edu/524078), Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2018

dengan peneliti lain. Ada tiga *size variables* yang umum digunakan, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, dan GDP.

Lebih lanjut Ebel dan Yilmaz menyatakan bahwa baik penerimaan dan atau pengeluaran pemerintah bukanlah indicator yang sempurna untuk mengukur desentralisasi fiskal.

a. Penerimaan Daerah

Dalam mengalokasikan pembelanjaan atas sumber-sumber penerimaannya terkait dengan fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan besaran dan sektor apa yang akan dibelanjakan (kecuali transfer DAK yang digunakan untuk kebutuhan khusus. Menurut UU No 25 Tahun 1999 jo UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

b. Pengeluaran Daerah

Penerapan otonomi daerah pada tahun 2001 mengakibatkan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah yang awalnya adalah manifestasi dari pemerintah pusat dan bertindak atas pemerintah dari pusat, dengan diberlakukannya otonomi daerah berubah menjadi sebuah pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab otonom untuk mengatur wilayahnya (berdasarkan kebutuhan wilayah), dalam koridor hukum yang telah ditentukan.

Dapat menyediakan berbagai pelayanan public yang beragam, sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah haruslah berdasarkan pada prinsip efisiensi, agar system ekonomi ini dapat berjalan dengan optimal. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, wewenang pemerintah pusat meliputi enam bidang, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama . sementara wewenang pemerintahan daerah adalah: (1) perencanaan dan pengendalian pembangunan (2) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, (3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (4) penyediaan sarana dan prasarana umum; (5) penanganan bidang kesehatan, (6) penyelenggaraan pendidikan, (7) penanggulangan masalah social, (8) pelayanan bidang ketenagakerjaan, (9) fasilitas koperasi serta usaha kecil dan menengah, (10) pengendalian lingkungan hidup, (11) pelayanan pertahanan, (12) pelayanan kependudukan dan catatan sipil, (13) pelayanan administrasi umum pemerintahan, (14) pelayanan admistrasi (15) penyelenggaraan dasar lainnya, (16) urusan wajib lainnya yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Pengeluaran pemerintahan harus dilakukan guna membiayai berbagai aktifitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

### 3. Desentralisasi Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Desentralisasi yang didefinisikan sebagai devolusi kekuasaan dan wewenang untuk lokal, memiliki aspek politik dan administrasi ekonomi fiskal. Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai pelimpahan tanggung jawab kebijakan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah berkaitan dengan keputusan pengeluaran dan pendapatan.

Kebijakan fiskal dalam Islam merupakan salah satu alat yang bekerja untuk mencapai tujuan Syariah.<sup>6</sup> Unsur-unsur utama dari teori fiskal Islam ini adalah:

- 1) Ekonomi Islam terdiri dari ekonomi tiga sektor, yaitu, sektor swasta, sektor sosial/sukarela, dan sektor publik. Tiga sektor bekerja sama, memberikan kerangka kelembagaan pada perekonomian Islam;
- 2) Zakat sebagai dasar dari sistem fiskal;
- 3) Penerapan semua instrumen fiskal melarang adanya eksploitasi yang menyebabkan riba, gharar/ ketidakpastian, spekulasi, produk/jasa yang diharamkan dan semua bentuk kezaliman.
- 4) Alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi dari ekonomi Islam diproses dan dilaksanakan melalui semua sektor tersebut secara bersama-sama;

---

<sup>6</sup>Any Setianingrum, "Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam" *Ekonomika-Bisnis* Vol. 4 No.1 Bulan Januari Tahun 2013, h. 1



- 5) Peran sektor publik dibanding sektor lain adalah minimal tapi penting sejauh beroperasi terus menerus untuk memastikan alokasi optimal sumber daya yang ada dalam masyarakat, distribusi pendapatan, dan membangun stabilitas.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.<sup>7</sup>

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah sangat menentukan kemandirian otonomi, akan tetapi, yang umum dipersoalkan adalah terbatasnya jumlah uang yang dimiliki daerah dibandingkan dengan yang dimiliki pusat. Dari berbagai kenyataan mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Daerah otonomi masih bergantung besar pada pendanaan pemerintah pusat.

Pembangun utama pemerintahan daerah otonomi yang terkenal adalah “Umar bin Khattab”, khalifah kedua dan demokrat Islam terbesar. Beliau telah mewujudkan prinsip-prinsip musyawarah dan *ūli al-amri*

---

<sup>7</sup>M. Makhfudz, “Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah” *Jurnal Hukum* Vol. 3 No.2, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, h. 381.

yang diajarkan Islam dalam pemerintahan daerah otonomi yang memiliki hak-hak penuh untuk mengatur daerahnya. Disamping hak otonomi, daerah juga diberi hak melaksanakan peraturan-peraturan dan instruksi dari pemerintah pusat.

Secara teknis, seperti negara-negara lain, negara Islam juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban dan untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara dalam perspektif Islam juga harus aktif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan kekayaan dan mempromosikan tatanan ekonomi dan sosial yang egaliter.

kebijakan desentralisasi memiliki ruang dalam ajaran Islam sebagaimana diujuk pada sejumlah hadits dan asarsahabat. Desentralisasi juga memiliki fondasi dalam perjalanan sejarah umat Islam karena di praktekan oleh Dinasti 'Usmaniyyah yang merupakan symbol terakhir kekuasaan pemerintahan Islam.

Praktek desentralisasi khusus juga layak disebutkan sebagaimana yang terjadi dalam hubungan antara pemerintah pusat Dinasti 'Us-māniyyah dan wilayah Krimea (Ukraina) di bawahnya. Wilayah ini menjadi contoh bagaimana aplikasi hukum Islam terutama berkaitan dengan aspek ekonomi dapat mengalami perubahan sesuai tuntutan yang ada. Gambaran di atas menunjukkan bahwa dalam perjalanan sejarah Dinasti 'Usmāniyyah telah mempraktekan desentralisasi dengan beragam tingkatnya. Pemisahan kekuasaan pada sejumlah wilayah yang dipimpin

kelompok penguasa. Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa luasnya wilayah yang dikuasai menjadi salah satu alasan mengapa desentralisasi menjadi penting.

Pengalaman menjalankan desentralisasinya juga ditemui dalam kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia yang saat ini menjadi negara demokratis terbesar ketiga dunia dan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Baik dalam pengalaman Dinasti 'Usmaniyyah maupun Indonesia, praktek desentralisasi terbukti tidak dengan serta merta menyelesaikan semua masalah mengingat dalam perkembangan terdapat sejumlah dinamika.<sup>8</sup>

Praktek desentralisasi di kedua contoh di atas mampu memberikan dampak positif berupa terjaganya kesatuan bangsa sebagai modal utama dalam pembangunan meskipun diiringi dengan dominasi pemerintah pusat dalam bentuk kekuatan militer di posisi pemerintahan. Stabilitas politik ini juga diakui sebagai salah satu unsur penting sebuah negara dalam ajaran Islam. Selain itu, negara dalam Islam juga memiliki sejumlah tujuan sosial ekonomi yaitu menegakkan keadilan atau persamaan, pembagian kesejahteraan dalam masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan budaya dalam masyarakat.


---

<sup>8</sup>Op.cit, "Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam", h.5

### C. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Sumber-sumber penerimaan daerah bisa diperoleh dari pendapatan asli daerah tersebut namun, bisa diperoleh dari bantuan pemerintah pusat. Sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 adalah : pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.<sup>9</sup>

#### 1. Pendapatan Asli Daerah



Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).<sup>10</sup>

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut undang-undang no.34 tahun 2000 adalah terdiri dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan pendapatan asli daerah memberikan keleluasaan kepala daerah dalam menggali pendapatan pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Hadi Hasani,” Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi Kesenjangan Antara Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Dikabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, Vol.16 No.1, 2009, H. 50

<sup>10</sup> A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), H.32

otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>11</sup> Sumber-sumber pendapatan asli daerah:

- a. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan atas tanah dan bangunan.
- b. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.<sup>12</sup>

Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan :

- a) Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contoh retribusi jasa umum meliputi :
- b) Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

<sup>11</sup> Yuliati, *Akuntansi Sektor Public Catatan Kelima* ( Jakarta, Salemba Empat, 2000), h.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah



c) Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (bagian laba BUMD, deviden dan penjualan saham milik daerah, penjualan asset daerah dan lain-lain).

## 2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.<sup>13</sup> Dana perimbangan meliputi:

- a. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN berupa pajak dan sumber daya alam, yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.
- b. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

dana transfer antara tingkat pemerintah yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu.

- c. Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu kebutuhan tertentu.

### **3. Pinjaman Daerah**

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pinjaman daerah merupakan solusi alternative untuk membiayai pembangunan, dimana pada era otonomi saat ini beban belanja untuk pembangunan di daerah cukup besar, Serta tuntutan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan umum semakin meningkat. sehingga dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk bekerja keras mencari sumber-sumber alternatif pendapatan dan pembiayaan yang cukup memadai.

Pinjaman daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menetapkan batas maksimal komulatif pinjaman pemerintah dan pemerintah daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkem-

bankan perekonomian nasional, batas maksimal kumulatif pinjaman tidak melebihi 60% dari produk domestik bruto tahun bersangkutan.<sup>14</sup>

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dengan bersumber pada :

- a. Pemerintah
  - 1) Pendapatan dalam negeri (rekening pembangunan daerah)
  - 2) Pinjaman luar negeri (*subsidiary loan agreement on-lending*)
- b. Pemerintah daerah lain
- c. Lembaga keuangan bank
- d. Lembaga keuangan bukan bank
- e. masyarakat

#### 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah

Lain-lain pendapatan bertujuan memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan juga pinjaman daerah.<sup>15</sup> Lain-lain pendapatan daerah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan darurat.

##### a. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang

<sup>14</sup>*Ibid*, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

<sup>15</sup>*Ibid*, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.<sup>16</sup> Atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi, atau diteruskan kepada pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

b. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari pemerintah yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan diakibatkan oleh faktor alam, dan faktor non alam dan/atau faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda yang mengganggu kegiatan perekonomian dan sosial.<sup>17</sup>

## 5. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam hal kebijakan fiskal, Islam mengatur dengan baik tentang bagaimana cara negara menyusun anggaran belanjanya, baik dari sektor penerimaan maupun dari sektor belanjanya. Terdapat dua sistem ekonomi untuk mengatur kebijakan fiskal suatu negara yaitu sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi

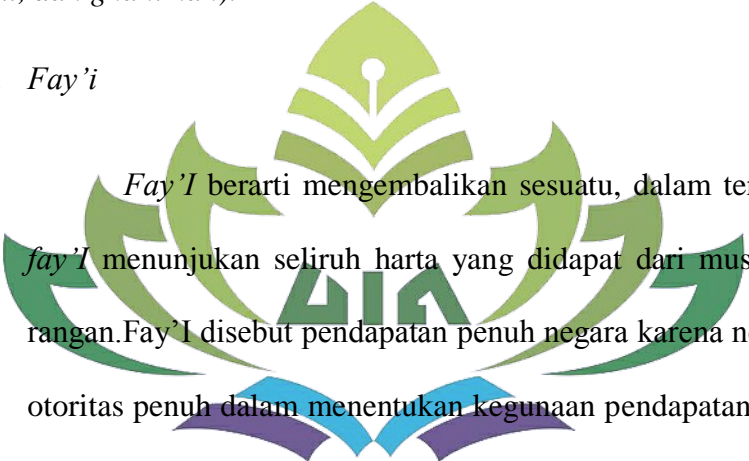
<sup>16</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/Peraturan Menteri Keuangan 05. 2011, Www.Kemenkeu.Go.Id, Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2018

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Dana Darurat, Www.Sipuu.Setkab.Go.Id , Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2018.

kapitalisme, penyusunan anggaran belanja negara dituangkan dalam nota APBN. Sedangkan dalam sistem ekonomi islam, kebijakan penyusunan anggaran negara dikelola oleh sebuah lembaga yang bernama Baitul Mal.

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum Muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada *Baitulmal*. Dari berbagai macam instrument pajak diterapkan atas individu (*fay'I, jizyah, kharaj, ushr, zakat, dan ghanimah*).<sup>18</sup>

a. *Fay'i*



*Fay'I* berarti mengembalikan sesuatu, dalam terminologi hukum *fay'I* menunjukan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa perlawanan. *Fay'I* disebut pendapatan penuh negara karena negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat.

b. *Jizyah*

*Jizyah* adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di Negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jadi *jizyah* tersebut diambil akibat kekufuran mereka. Sebagai firman Allah SWT dalam AL-qur'an surah at-taubah ayat 29 :

---

<sup>18</sup> M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.260



قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan rasulnya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”<sup>19</sup>

Jizyah dikenakan atas diri orang kafir, bukan atas harta mereka. Jizyah juga tidak gugur dari mereka sekalipun mereka ikut dalam perang. Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah termasuk *fay'I* didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik yang ikut perang maupun tidak.<sup>20</sup>

#### c. Kharaj

Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para wilJayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Sebagai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿٧٢﴾

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya” (PT Riels Grafika, 2009), h. 191

<sup>20</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Jakarta: Rajawali pers, 2011), h. 105

*Artinya :“atau kamu (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari tuhanmu lebih baik, karena dia pemberi rezeki yang baik.”*<sup>21</sup>

Kharaj dikenakan atas orang kafir dan juga muslimin dan kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proposional) yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata terlepas dari seseorang tersebut muslimin ataupun non muslim. Hasil penguasaan kharaj didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum muslimin disetiap masa.<sup>22</sup>

d. *'ushr* (bea cukai)

Dikalangan ahli fiqh 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama dari lahan pertanian yang disirami oleh hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari orang muslim dan didistribusikan sebagai zakat. Dan 10% yang kedua diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah islam karena membawa barang dagangan. objek bea cukai ini adalah nilai barang dagang yang melintasi wilayah perbatasan islam. Karena termasuk sumber pendapatan penuh maka *'ushr* digunakan untuk kepentingan umum negara secara luas.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*” (PT. Riels Grafika, 2009), h. 346

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 109

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 114

e. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barokatu* ‘keberkahan’, *al-nama* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Zakat dapat diartikan sebagai pungutan wajib, atas semacam pajak yang dipungut dari kaum muslimin yang didistribusikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tidak berpenghasilan.<sup>24</sup>

f. *Ghanimah*

*Ghanimah* merupakan jenis barang bergerak yang dapat dipindahkan, yang diperoleh dalam peperangan melawan musuh. Anggota pasukan akan mendapatkan bagian sebesar empat per lima dari jumlah yang ada dan sisanya dipergunakan bagi kepentingan umum dan keluarga nabi.<sup>25</sup> Hal ini terdapat dalam ayat Q.S .Al-Anfal

41

﴿ ayat 41: وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا  
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾

Artinya:“ Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya

<sup>24</sup> M. Nur Rianto, *Op. Cit*, h. 277

<sup>25</sup> *Op. Cit*, h.263

*seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>26</sup>*

Kebijakan fiskal yang dijalankan pada era modern ini minus zakat dan instrument islam lainnya, yakni : shadaqah, infak, dan waqaf, memiliki kerangka tujuan yang sejalan dengan perspektif ekonomi islam. Namun penyimpangan pada implementasi masih banyaknya muatan eksploitasi sebagaimana yang dilarang dalam islam. Kebijakan fiskal terpusat pada instrument zakat dan system perpajakan.

Mengingat fungsi dari pemerintahan Islam yang modern tidak dapat lagi terbatas pada fungsi-fungsi seperti yang pernah dijalankan oleh pemerintahan Islam dahulu, menjadi tidak realistis pula mengasumsikan bahwa pajak sekarang dapat dibatasi hanya pada golongan-golongan ekonomi tertentu seperti yang didiskusikan ulama-ulama klasik. Perekonomian pada saat tersebut terutama bertumpu pada pertanian, oleh karenanya, pajak seperti *kharaj* dan *ushr* juga merupakan pajak utama atas output-output pertanian. Sedangkan pajak lainnya memberikan sumbangan yang relatif kecil. Corak perekonomian sekarang telah berubah, atau tengah berubah, dan sumber pendapatan yang lebih layak dan lebih terdiversifikasi telah tersedia bagi pemerintah yang modern. Oleh karena itu, sumber pendapatan lama seperti *ghanimah* dan

---

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*” (PT Riels Grafika, 2009), H.182

*jizyah* mungkin sudah tidak relevan lagi pada masa modern ini dan mungkin harus dikesampingkan.

#### **D. Pertumbuhan Ekonomi**

##### **1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki 3 komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.<sup>27</sup>

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang dikur menggunakan

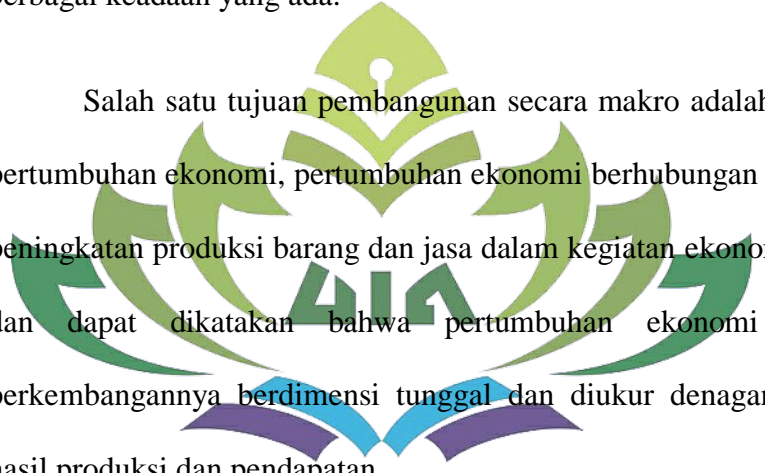
---

<sup>27</sup> M.L.Jhingan, “*Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*” (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2012), h. 57



produk domestik bruto (PDB) maupun produk domestic regional bruto (PDRB ) dalam suatu wilayah.<sup>28</sup>

Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.<sup>29</sup>



Salah satu tujuan pembangunan secara makro adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangannya berdimensi tunggal dan diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya.

---

<sup>28</sup> Raharjo Adisasmita, *“Teori-Teori Pembangunan Ekonom, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wiayah”* Cetakan Pertama(Yogyakarta: Graha Ilmu,2013), h. 4

<sup>29</sup> Michael Todaro, *Pemebangunan Ekonomi Didunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2000 ), h. 117

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Ada 4 (empat) Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:<sup>30</sup>

### a. Akumulasi modal

Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan pada masa sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk dapat memperbesar output pada masa yang akan datang. Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan, dan barang-barang baru akan meningkatkan stok modal fisik suatu Negara sehingga pada gilirannya akan memungkinkan Negara tersebut untuk mencapai output yang lebih besar. Investasi ini sering diklasifikasikan sebagai investasi disektor produktif. Investasi-investasi lainnya dikenal dengan sebutan infrastruktur social ekonomi yaitu jalan raya, listrik, air dan komunikasi mempermudah dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Investasi modal insani juga dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan juga akan mempunyai pengaruh yang sama atau bahkan lebih besar terhadap kapasitas produksi. Investasi pada modal manusia akan memperbaiki kualitas sekaligus mening-

---

<sup>30</sup> Lincolin'' Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2015), h. 270-276

katkan produktifitas sumberdaya-sumberdaya yang ada melalui investasi yang strategis.

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian.

c. Tingkat Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi mencakup dua bentuk, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk berkaitan dengan produk-produk baru yang sebelumnya tidak ada atau pengembangan produk-produk sebelumnya. Sedangkan inovasi proses merupakan penggunaan teknik-teknik baru yang lebih murah dalam memproduksi produk-produk yang telah ada.

d. Sumber daya institusi (system kelembagaan)

Menurut North peran institusi dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat netral. Institusi adalah aturan-aturan

yang mengatur interaksi politik, ekonomi, dan social. Institusi terdiri dari aturan informal (adat istiadat, tradisi, norma, social dan agama) dan aturann formal (konstitusi, undang-undang,dan aturan-aturan).

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatann ekonomi, organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wirausahawan tampil sebagai organisator dan mengambil resiko dalam menghadapi ketidakpastian, menurut Schumpeter seorang wirausahawan tidak perlu seorang kapitalis, fungsi utamanya adalah melakukan pembaruan (inovasi), Dengan demikian masyarakat akan bebas dalam berinovasi dan mengembangkan segala potensinya yang dimilikinya, sehingga akan tercapainya pertumbuhan ekonomi.

### 3. Indikator Pertumbuhan Wilayah

Teori yang dikemukakan oleh Raharjo Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolakukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai berikut:<sup>31</sup>

#### a. Ketidakseimbangan Pendapatan

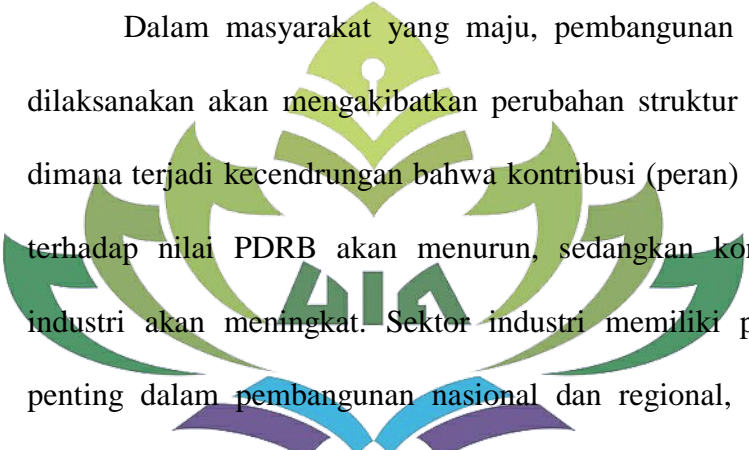
Dalam keadaan yang ideal, dimana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen

---

<sup>31</sup> Raharjo Adisasmita, *Op. Cit*, h. 91

populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut peserikatan bangsa-bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi menjadi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu wilayah.

#### b. Perubahan Sruktur Perekonomian



Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peneingkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor.

#### c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenaga kerjaan dan kesempatan kerja, merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah terlalu banyak, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis finansial negara-negara di dunia. Untuk mengatasi



krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peran pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau keseluruhan kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi akan menunjang perkembangannya berbagai kegiatan disektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

d. Tingkat Dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini kemudahan diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapat bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya.

e. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep produk domestik regional

bruto (PDRB).PDRB merupakan ukuran prestasi (kerhasilan) ekonomi seluruh kegiatan ekonomi.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dengan menggunakan pada produk domestik regional bruto (PDRB) menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan.PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000.

PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional.

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun

sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Selain itu, pendapatan per kapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membanding tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Regional yang disajikan secara berkala akan dapat diketahui: Tingkat pertumbuhan ekonomi, Gambaran struktur perekonomian, Perkembangan pendapatan per kapita, Tingkat kemakmuran masyarakat, Tingkat inflasi dan deflasi.

Pertumbuhan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dalam dimensi geografis. Dari perkembangan wilayah inilah yang nantinya menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan suatu indikator-indikator dan pembangunan.

Pemahaman yang memadai tentang indikator pertumbuhan wilayah ini akan berimplikasi pada semakin terarahnya pelaksanaan

pembangunan yang dilaksanakan dan semakin tingginya response masyarakat dalam menyukseskan dan mencapai sasaran atau target dari perkembangan wilayah.

#### 4. Teori Pertumbuhan Ekonomi

##### a. Teori Rostow

Menurut Rostow transisi dari keterbelakangan ke perekonomian maju dapat diuraikan dalam serangkaian langkah atau tahap yang harus dimulai semua negara, seperti yang dikemukakan dalam bukunya *the stages of economic growth* menyajikan sejarah ekonomi menggeneralisasi perjalanan sejarah modern. Semua masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai dimensi perekonomian, dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari lima kategori : masyarakat tradisional, prakondisi sebelum lepas landas untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, lepas landas, tahapan menuju kematangan ekonomi, dan tahap konsumsi misal yang tinggi.<sup>32</sup>

Dalam argumentasinya, negara-negara maju dinyatakan telah melewati semua tahap “lepas landas kepertumbuhan yang berkelanjutan dengan sendirinya”, dan negara-negara terbelakang yang masih berada dalam tahap masyarakat tradisional atau dalam tahap “prakondisi” hanya perlu mengikuti seperangkat aturan pembangunan

---

<sup>32</sup> Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, “*Pembangunan Ekonomi Edisi Ke Sebelas Jilid I*” (Jakarta: Erlangga. 2011), h. 135

tertentu untuk lepas landas menuju masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Salah satu strategi utama pembangunan yang diperlukan untuk dapat lepas landas adalah mobilisasi tabungan dalam dan luar negeri untuk menghasilkan investasi yang cukup guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

#### **b. Teori Harrod-Domar**

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu:<sup>33</sup>

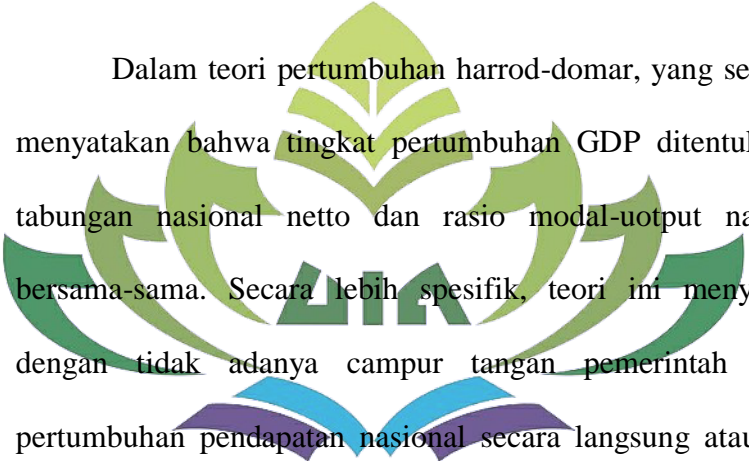
- a) Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b) Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d) Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save* = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*capital-output ratio* = COR) dan rasio

---

<sup>33</sup>Muhammad rusyidi, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi" *Jurnal Ilmu Ekonomi Balance*, Vol. 7 No.1, Juni 2011, h.45

pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio* = ICOR).

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal- output (COR).



Dalam teori pertumbuhan harrod-domar, yang secara sederhana menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ditentukan oleh rasio tabungan nasional netto dan rasio modal-uotput nasional, secara bersama-sama. Secara lebih spesifik, teori ini menyatakan bahwa dengan tidak adanya campur tangan pemerintah maka tingkat pertumbuhan pendapatan nasional secara langsung atau posistif akan berkaitan dengan rasio tabungan (yaitu, semakin besar bagian GDP perekonomian yang dapat ditabung dan diinvestasikan, semakin besar pula pertumbuhan GDP) dan berbanding terbalik atau negative berkaitan dengan rasio modal-output perekonomian (yakni, semakin tinggi c, semakin rendah pula pertumbuhan GDP).<sup>34</sup>

Agar dapat tumbuh, setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan bagian tertentu dari GDP. Semakin banyak yang

---

<sup>34</sup>Michael p. todaro, Stephen c. smith, *Op cit*, h. 137-138



ditabung dan diinvestasikan maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat.

### c. Teori Adam Smith

Menurut pandangan adam smith, kebijakan *laissez faire* atau mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat di capai oleh masyarakat. Menurut pandangan adam smith pengembangan hak milik (*property right*), spesialisasi dan pembagian kerja merupakan faktor-faktor yang terjalin dalam proses pertumbuhan ekonomi secara historis. Smith membagi sejarah peradaban manusia kedalam empat tahapan yaitu: *pertama*, tahap berburu (*hunting*), *kedua*, tahap berternak (*pastoral*), *ketiga*, pertanian (*agriculture*), *keempat*, tahap perdagangan (*commerce*).<sup>35</sup>

Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang penting. Menurut teori adam smith, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Melihat dari fokus-fokus teori pembangunan yang telah disebutkan sebelumnya, teori yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi maupun wilayah/daerah diindonesia adalah model harrod-domar dimana tabungan dan investasi hal yang perlu ditingkatkan.

---

<sup>35</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta : UUP STIM YKPN, 2015),h. 73-74

Tingginya tabungan dan investasi akan memperbesar kemungkinan peminjaman modal bagi masyarakat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi., dengan dasar teori harrod-domar melalui peningkatan investasi dan tabungan, serta pembaruan teknologi dan beberapa faktor lainnya diharapkan dapat mempercepat pembangunan.

## 5. Proses Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam yaitu faktorekonomi dan nonekonomi, faktor-faktor tersebut sebagai berikut:<sup>36</sup>

### a. Faktor Ekonomi

#### a) Sumber Alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya atau tanah. Tanah sebagaimana dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunanya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya. Dalam dan bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang sangat penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat.

---

<sup>36</sup> M.L.jhingan, *op cit*, h.229-230

## b) Akumulasi Modal

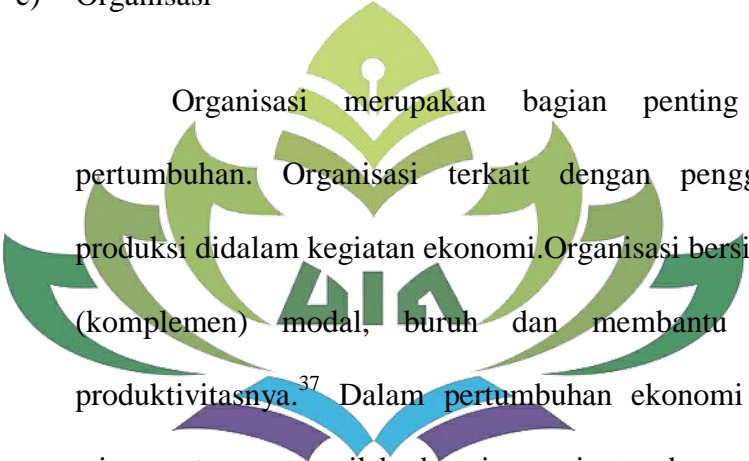
faktor ekonomi penting kedua dalam pertumbuhan ialah akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal.

Proses pembentukan modal bersifat komulatif dan membiayai diri sendiri serta mencakup tiga tahap yang saling berkaitan, pertama keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya, kedua keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakan tabungan dan menyalurkan kejalur yang dikehendaki, ketiga mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Disatu pihak ia mencerminkan permintaan efektif, dan dipihak lain ia menciptakan efisiensi produk bagi produksi dimasa depan. Proses pembentukan modal menghasilkan kenaikan ouput nasional dalam berbagai cara. Pembentukan diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di negara itu. Investasi dibarang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. Pembentukan modal ini juga membawa kearah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi pada gilirannya membawa kearah spesialisasi dan penghematan dalam produksi skala luas. Pembentukan modal membantu usaha

penyediaan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga buruh yang semakin meningkat. Penyediaan *overhead* social dan ekonomi seperti pengangkutan, sumber tenaga, pendidikan dan sebagainya dinegara bersangkutan dimungkinkan melalui pembentukan modal juga. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah panggilan sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

c) Organisasi



Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi terkait dengan penggunaan faktor produksi didalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya.<sup>37</sup> Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wiraswastawan tampil berbagai organisator dan pengambil risiko diantara ketidakpastian.ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain.

Jadi disamping perusahaan swasta, pengertian organisasi mencakup pemerintah, bank dan lembaga-lembaga internasional yang ikut terlibat didalam memajukan ekonomi negara maju dan negara sedang berkembang.


---

<sup>37</sup>*Ibid*, h.70

d) Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan didalam metode produksi yang merupakan hasil pembaruan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi lain.<sup>38</sup>

e) Pembagian Kerja Skala Produksi



Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membentuk perkembangan industri. Hal ini menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Adam Smith menekankan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari pada sebelumnya ia menghemat waktu. Ia mampu menemukan mesin baru dan berbagai proses baru dan berbagai proses baru dalam produksi. Akibatnya, produksi meningkatkan berbagai hal. Akan tetapi, pembagian kerja tergantung pada luas pasar. Luas pasar, sebaiknya tergantung pada kemajuan ekonomi, yaitu seberapa jauh perkembangan permintaan, tingkat produksi pada umumnya,

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h.72

sarana transportasi, dan sebagainya. Jika produksi luas, spesialisasi dan pembagian kerja akan meluas pula. Hasilnya, jika produksi naik, laju pertumbuhan ekonomi akan melesat. Ekonomi eksternal keuangan semakin banyak tersedia dan manfaat dari investasi minimal adalah sumber tenaga, angkutan dan sebagainya, yang penggunaannya membawa kearah kemajuan industri. Dengan cara ini produksi meningkat dan pertumbuhan ekonomi kian melaju.<sup>39</sup>

#### **b. Faktor non-ekonomi**

Faktor non-ekonomi bersama-sama faktor ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Dalam kenyataan, faktor non-ekonomi pada umumnya seperti, organisasi sosial, budaya, dan politik, mempengaruhi faktor ekonomi yang dibicarakan diatas. Oleh karena itu, faktor non-ekonomi juga memiliki arti penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Nurkse, “pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik, dan latar belakang historis.” Di dalam pertumbuhan ekonomi, faktor sosial, budaya, politik dan psikologis adalah sama pentingnya dengan faktor ekonomi. Sebagaimana dikemukakan prof. Kaldor, pengkajian terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi, diluar analisa faktor ekonomi, membawa kita kepada pengkajian kita terhadap unsure-unsur penentu yang bersifat psikologis dan sosialis dalam faktor-faktor ini. Perubahan terjadi pada faktor non-ekonomi yang pokok dibawah ini:

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h.73



a) Faktor sosial

Faktor social dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan barat membawa kearah penalaran (*reasoning*) skeptisme. Ia menanamkan semangat kembara yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai social. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, dan menikmati resiko untuk memperoleh laba. Mereka mengembangkan apa yang oleh lewis disebut “hasrat untuk berhemat” dalam rangka memaksimumkan output berdasarkan input tertentu.<sup>40</sup>

Dinegara terbelakang ada tradisi social dan budaya yang tidak menunjang perkembangan ekonomi. Agama misalnya, kurang menunjang sikap hidup hemat dan kerja keras. Orang menyerah pada takdir dan arena itu tidak suka kerja keras. Mereka kebanyakan dipengaruhi oleh adat kebiasaan dan lebih menghargai waktu senggang, kesenangan dan keikutsertaan pada pesta-pesta upacara keagamaan. Dengan demikian uang dihabiskan pada usaha-usaha non-ekonomi. Pandangan budaya menghalangi kemajuan dan menyebabkan lembaga social ekonomi dan politik tetap pada posisi terbelakang. Dengan kata lain, pandangan budaya bertentangan dengan pembangunan ekonomi.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h..74

b) Faktor manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekan pada efisiensi mereka.<sup>41</sup>

Penggunaan secara tepat sumber daya manusia untuk membangun ekonomi dapat dilakukan dengan cara berikut.

*Pertama*, harus ada pengendalian atas perkembangan penduduk. Sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan baik apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan dan diturunkan. *Kedua*, harus ada perubahan dalam pandangan tenaga kerja buruh. Perilaku tenaga kerja buruh merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan ekonomi.

Untuk meningkatkan produktivitas dan mobilisasi buruh. Pandangan masyarakat harus dirubah agar mereka bersedia arti penting dan martabat buruh. Hal ini memerlukan perubahan dalam faktor kelembagaan dan social. Perubahan semacam ini tergantung pada penyebaran pendidikan. Hanya tenaga buruh yang terlatih dan terdidik dengan efisiensi tinggi yang akan membawa masyarakat kepada pambanguann ekonomi yang pesat. Jadi, persyaratan yang paling penting bagi laju pertumbuhan industry ialah

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h.75

manusia. Manusia yang bersedia menyambut baik tantangan perubahan ekonomi dan menerima kesempatan yang ada di dalamnya. Manusia diatas segalanya, yang berdedikasi pemebangunan ekonoi negerinya, dan terhadap kejujuran, kewibawaan, pengetahuan dan prestasi kerja.

c) Faktor politik dan administratif

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembagunan ekonomi negara berkembang. Administratif yang kuat, efisien dan tidak korup, denagan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi. Lewis dengan tepat melihat tindakan pemerintah memainkan peranan penting di dalam merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi.<sup>42</sup>

Ketertiban, stabilitas dan perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan semakin besar kebebasan ini, semakin berhasil pula kewiraswastaan tersebut. Kemajuan teknologi, mobilitas faktor dan pasar yang luas membantu merangsang usaha dan inisiatif. Tetapi yang pertama itu hanya dapat terjadi dibawah administratif yang bersih dan kondisi politik yang stabil. Begitu juga, pemerintah yang baik, denangan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, serta penyediaan fasilitas modal overhead tepat pada waktunya, akan

---

<sup>42</sup>*Ibid*, h.76

menunjang pebentukan modal. Jadi pemerintah harus memberikan kepada masyarakat jasa-jasa yang diperlukan untuk merangsang perkembangan seperti: ketertiban, keadilan, keamanan, dan pertahanan. Imbalan yang sepadan dengan kemampuan dan penerapan dalam produksi, jaminan di dalam menikmati harta kekayaan, hak-hak akan warisan, jaminan akan kesepakatan dan perjanjian bisnis akan dipegang teguh, pengaturan standar penakaran, ukuran, dan mata uang, serta kestabilan system pemerintahan itu sendiri untuk memelihara rasa ketertiban dan kepastian akan harapan dan pekerjaan yang dapat di raih di masa depan. Dalam administrasi yang lebih bersih dan kuat seperti keadilan sepenuhnya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh lewis, tidak ada negara yang berhasil maju tanpa dorongan positif dari pemerintah yang cakap.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan faktor nonekonomi faktor ekonomi tersebut adalah tersedianya sumber alam atau tanah secara melimpah merupakan hal yang sangat penting, suatu negara atau daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. Selain adanya faktor ekonomi, faktor non ekonomi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Faktor non ekonomi tersebut antara lain ; perubahan pandangan, nilai-nilai sosial,

pendidikan membawa kearah penalaran (reasoning) dan adanya semangat yang menghasilkan berbagai penemuan baru.<sup>43</sup>

Dengan adanya faktor ekonomi dan nonekonomi agar terarah dan terfokusnya pembangunan serta melancarkan perekonomian, dengan adanya pembangunan ekonomi bisa digunakan untuk melancarkan kegiatan ekonomi yang ada sehingga pertumbuhan ekonomi pun juga dipercepat prosesnya dan pelaksanaanya. Faktor ekonomi dan nonekonomi dimana mereka saling memiliki ketergantungan satu sama lainnya dan bersinegi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan adanya faktor-faktor tersebut perekonomian bisa menjadi lebih baik.

## **6. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Konsep Ekonomi Islam**

### **a. Tinjauan Ekonomi Islam**

Banyak para ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktifitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi,

---

<sup>43</sup>Andi famrizal, "Analisis Faktor Ekonomi Dan Faktor Non Ekonomi Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Sigi Biro-maru Kabupaten Sigi" *Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No. 8, Agustus 2017, h.191-203

melainkan aktivitas manusia yang ditunjukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.<sup>44</sup>

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga berkaitan dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan.<sup>45</sup>

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi. Perspektif islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang di maksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan, dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapasitas yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang di tunjukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.

---

<sup>44</sup> Abdullah Abdul Husain at-taqiri, "*Ekonomi Islam*" (Magistra Insania Press:Yogyakarta, 2004), h.282

<sup>45</sup> Almizan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 2, Juni-Desember 2016, h. 207



Menurut abdurahman yusro,<sup>46</sup> pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam Q.S.Nuh ayat 10-12:<sup>47</sup>

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

Artinya : “10. Maka aku katakana kepada mereka: ‘mohonlah ampun kepada tuhanmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun, 11. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, 12. Dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai”.<sup>48</sup>

Dijelaskan pula dalam firman allah Q.S AL- A’raf ayat 96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya : “jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.<sup>49</sup>

Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istigfar atau eminta ampun. Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari

<sup>46</sup>Op. cit, h.283

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT Riels Grafika,2009), h. 456

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT Riels Grafika,2009), h.571

<sup>49</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT Riels Grafika,2009), h.163

kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada tuhan, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan kesetabilan hidup.

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang terus menerus dari faktor-faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan. Dalam Islam, kesejahteraan tersebut dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dapat dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk.

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus memasukkan aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja melainkan memasukkan juga aspek ruhaniyah. Islam memang mengajarkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam sebuah negara, bahkan bukan hanya pembangunan dan pertumbuhan di bidang materi saja, tapi segi spiritual dan moral pun menempati kedudukan yang sangat penting.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Zainal Abiding, "Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah Atas Kontribusi System Ekonomi Islam Atas System Ekonomi Konvensional)" *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2, Desember 2012. h.364

## b. Karakteristik Ekonomi Islam Dan Tujuan Ekonomi islam

Terdapat beberapa karakteristik yang merupakan kelebihan dalam dalam sistem ekonomi islam menurut Abdullah at-tariqi antara lain:<sup>51</sup>

### a) Bersumber dari illahiyah

Sumber awal ekonomi islam yang merupakan bagian dari muamalah, berbeda dengan sumber system ekonomi lainnya karena merupakan peraturan dari allah. Ekonomi islam dihasilkan dari agama alla dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. System ini meliputi semua aspek universal dan partikular dari kehidupan dalam satu bentuk. Dalam posisi sebagai pondasi, system ekonomi islam tidak berubah adalah cabang dan bagian partikularnya, namun bukan dalam isi pokok dan sifat universalnya.

Demikian juga sistem ekonomi ini sesuai dengan fitrah manusia, artinya sistem ini sesuai dengan naluri seluruh manusia dan kapan pun, asalkan manusia menggunakan system. Sebagai mana pesan al – Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

<sup>51</sup> Lukman hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga,2012),h. 10-13

*Artinya :“ maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.”<sup>52</sup>*

(Maka hadapkanlahhai Muhammad) wajahmu dengan lurus kepada agama Allah), maksudnya cenderungkanlah dirimu kepada agama Allah, yaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agama-Nya (fitrah Allah) ciptaan-Nya (yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) yakni agama-Nya. Makna yang dimaksud ialah, tetaplah atas fitrah atau agama Allah. (Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya. Maksudnya janganlah kalian menggantinya, misalnya menyekutukan-Nya. (Itulah agama yang lurus) agama tauhid itulah agama yang lurus (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang kafir Mekah (tidak mengetahui) ketauhidan atau keesaan Allah.

b) Ekonomi pertengahan dan berimbang

Ekonomi islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Ekonomi islam berposisi diantara aliran individu (kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolute dan tidak boleh di interfensi oleh siapapun, dan aliran sosialis (komunis) yang menyatakan

---

<sup>52</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT Riels Grafika, 2009), h.407

ketiadaan hak individu dan mengubahnya ke dalam kepemilikan bersama dengan menempatkan dibawah dominasi negara.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi pertengahan yang adil, yang dengan nya Allah menjadikan ciri khas utama ummat ini, sebagaimana firman allah dalam QS.AL-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَانْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدٰى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ اِيْمَانَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : “demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”<sup>53</sup>

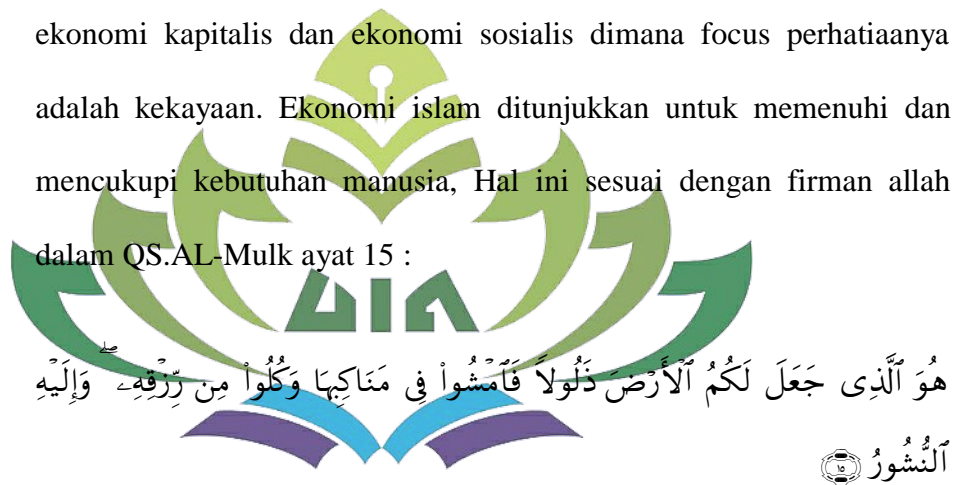
Diantara bukti sifat pertengahan dan keberimbangan ekonomi islam antara lain adalah posisi tengah yang diberikan kepada negara untuk melakukan intervensi bidang ekonomi. Aliran kapitalis tidak memberikan toleransi kepada negara untuk melakukan intervensi dalam aktivitas-aktivitas ekonomi, sementara aliran sosialis melihat

<sup>53</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT Riels Grafika, 2009), h.22

perlunya dominasi negara untuk melakukan intervensi dalam aktivitas ini dengan tujuan meniadakan kepemilikan pribadi.

c) Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan

Ekonomi islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah dimuka bumi untuk memakmurkannya dan tidak hanya untuk mengeksplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. berbeda dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis dimana focus perhatiannya adalah kekayaan. Ekonomi islam ditunjukkan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia, Hal ini sesuai dengan firman allah dalam QS.AL-Mulk ayat 15 :



Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>54</sup>

Jaminan social dalam islam dipusatkan atas dua pokok, yaitu asuransi umum dan masyarakat dalam sumber-sumber umum negara. Asas pertama tidak menuntut lebih dari adanya jaminan kebutuhan hidup dan kebutuhan individu, sedangkan asas kedua lebih dari itu. Asas kedua menuntut adanya pemenuhan lebih luas yang

<sup>54</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT Riels grafika, 2009), h.563



mencerminkan kesetaraan dalam hidup. Islam merekatkan jaminan ini dengan semangat (ukhuwah islamiyah) untuk menunjukkan bahwa hal ini bukan untuk saling mengisi, melainkan merupakan bentuk konkret ukhuwah islamiyah dimana yang satu dengan yang lain saling menjamin.

d) Ekonomi pertumbuhan dan keberkahan

Ekonomi islam memiliki kelebihan dari system yang lain yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi secara legal, agar tidak berhenti dari rotasinya dalam kehidupan sebagai bagian dari meditasi jaminan kebutuhan pokok bagi manusia. Islam memandang harta dapat dikembangkan hanya dengan bekerja. Hal itu hanya dapat terwujud dalam usaha keras untuk menumbuhkan kemitraan dan memperluas unsure-unsur produksi demi menciptakan pertumbuhan ekonomi dan keberkahan secara bersamaan.

Usaha yang dilakukan adalah melalui perputaran modal ditengah masyarakat islam dalam bentuk modal produksi sebagai kontribusi terhadap aturan-aturan yang dikembangkan. Islam melarang secara keras praktik monopoli, penumpukan dan penghentian atau pengalokasian dan perputaran harta.

Dari beberapa karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi islam tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertumbuhan produksi, namun ditunjukkan berlandaskan

keadilan distribusi. Keadilan dilakukan dengan memberlakukan kebaikan bagi semua manusia dalam kondisi apapun, dalam hal ini pemerintah daerah yang telah yang telah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan sudahkah mencukupi semua kebutuhan masyarakat secara adil dan berimbang. Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam islam yaitu adanya anggota masyarakat untuk mendapatkan kecukupan bukan kekurangan.

### c. Tujuan Dalam Ekonomi Islam

Tujuan dalam ekonomi Islam yang akan dijelaskan tentang tujuan-tujuan syari'ah dan kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Terdapat dua hal pokok yang diperlukan dalam memahami bagaimana mencapai tujuan hidup sebagai hasil dari usaha dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam islam, yaitu pertama tujuan mencapai falah dan yang kedua tujuan maslahah.

#### a. *Falah*

secara literal falah adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut islam falah dapat dimaknai sebagai keberuntungan didunia dan diakhirat.

Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimumkan output total semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari masyarakat muslim. Memaksimumkan output harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan serta permainan yang fair pada semua peringkat interaksi manusia.

Falah mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh kehidupan manusia. Aspek ini secara pokok meliputi spiritualitas dan moralitas, ekonomi, social dan budaya, politik dan termasuk aspek dari tujuan pertumbuhan ekonomi.

#### *b. Masalah*

Kesejahteraan di dunia dan diakhirat dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan hidup manusia atau masyarakat secara seimbang, sehingga akan menyebabkan dampak yang disebut masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan baik materi maupun non-materi yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Tujuan utama dari syariah islam yang juga merupakan tujuan ekonomi islam menurut as-shatibi adalah mencapai kesejahteraan

manusia terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahahan, yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta dan kelangsungan keturunan.

Untuk mencapai kedua tujuan tersebut yaitu falah dan terutama masalah yang secara otomatis tidak dapat kita lepaskan dengan kegiatan ekonomi kita sehari-hari adalah dengan mewujudkan dengan menjalankan bentuk ekonomi islam dalam mempercepat ekonomi dengan cara meningkatkan pendapatan. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*<sup>55</sup>

Pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan, meskipun manusia memaknai kesejahteraan dengan perspektif yang berbeda-beda. Islam memaknai kesejahteraan dengan istilah falah yaitu kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material-spiritual, individual-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan diakhirat. Falah dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang

<sup>55</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT Riels grafika, 2009), h.203

sehingga tercipta masalah. Dengan demikian, tujuan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan setiap individu yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat, yang merupakan kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia.

#### a. Prinsip dan nilai ekonomi Islam

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia, Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*).

Yusuf al-qardhawi menyatakan bahwa yang membangun ekonomi islam adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

1. Ekonomi islam menghargai nilai harta benda dan kedudukannya dalam kehidupan. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan membantu melaksanakan kewajiban, seperti

---

<sup>56</sup> Sukarno wibowo, Dedi supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: pustaka Setia, 2013),h. 67

sedekah (zakat), haji, dan hajad, serta persiapan utama untuk memakmurkan bumi.

2. Ekonomi islam mempunyai keyakinan bahwa harta sebenarnya milik allah, sedangkan manusia hanya memegang amanah atau pinjaman darinya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ  
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: “berimanlah kamu kepada allah dan rasulnya dan infakkanlah (dijalan allah) sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan allah) memperoleh pahala yang besar.”<sup>57</sup>

3. Ekonomi islam memerintahkan manusia untuk berkreasi dan bekerja dengan baik. Islam mengajak kita untuk berusaha dan bekerja. Islam memperingatkan kita dari sikap putus asa dan rasa malas. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذُلُوْلًا ۖ فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۚ وَاِلَيْهِ  
الُّنْشُوْرُ ﴿١٥﴾

Artinya: “dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki nya. Dan hanya kepada-nyalah kamu (kembali setelah)dibangkitkan.”<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT Riels Grafika,2009), h. 538

<sup>58</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT Riels Grafika,2009), h. 563



4. Ekonomi islam mengharamkan pendapatan dari pekerjaan yang kotor. Rasulullah SAW. Bersabda dalam H.R.Ahmad yang artinya, “setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya.”
5. Ekonomi islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan memeliharanya.
6. Ekonomi islam melarang pribadi untuk menguasai atau memonopoli barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat.
7. Ekonomi islam mencegah kepemilikan dari sesuatu yang membahayakan orang lain. Rasulullah SAW. Bersabda dalam H.R.ahmad dan Ibnu Majah yang artinya, “tidak ada bahaya dan tidak ada yang (boleh) membahayakan.”
8. Ekonomi islam menganjurkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi umat. Tanpa kemandirian ekonomi, umat islam tidak bisa menjalankan fungsi *ustadziatul'alam* (sokoguru dunia) dan menjadi saksi-saksi kebenaran atas umat yang lainnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: “Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas

*(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepada-Nya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik kebelakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mu. Sungguh, Allah maha pengasih, maha penyayang kepada manusia.”<sup>59</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada ditangan manusia pada hakikatnya milik Allah, akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya. Sesungguhnya Islam sangat menghormati milik pribadi, baik itu barang- barang konsumsi ataupun barang- barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.

dalam hal ekonomi prinsip islam adalah jangan sampai manusia tidak mengoptimalkan atau membiarkan apa yang telah Allah berikan di muka bumi dibiarkan begitu saja. Nikmat dan rezeki Allah dalam hal ekonomi akan melimpah jika manusia dapat mencari dan mengelolanya dengan baik. Ekonomi islam bertujuan agar dapat terpenuhinya kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang saja melainkan seluruh umat manusia secara keseluruhan agar dapat hidup berkualitas dan menunaikan ibadah dengan baik.

---

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT Riels Grafika, 2009), h.22

Sedangkan nilai-nilai dasar ekonomi islam terdiri dari tiga konsep fundamental, yaitu: <sup>60</sup>

a. Keimanan kepada Allah SWT

Tauhid merupakan pondasi ajaran islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada satupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah karena Allah adalah pencipta alam dan isinya sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu.

Dalam islam segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakan manusia adalah beribadah kepadanya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.

b. Kepemimpinan atau khalifah

Dalam al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Status khalifah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas

---

<sup>60</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.

ke khalifahan tersebut. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu itu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara intensif diperintahkan untuk hidup bersama, bekerja bersama dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing.

### c. Keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya manusia dapat manfaat dari padanya secara adil dan baik.

Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah swt, untuk memimpin rakyat, yang di akhirat kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah swt. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya jangan menganggap dirinya sebagai manusia super yang bebas dan berbuat dan memerintah apa saja kepada rakyatnya. Akan tetapi, sebaliknya ia harus memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.

Dalam hubungan nya dengan mengelola suatu daerah seorang pemimpin harus berlaku adil, bijaksana, dalam menentukan

keputusan-keputusan yang dibuat. Dengan pemimpin yang adil sudah barang tentu keadilan akan terasa ada dan hidup disamping kenyamanan serta contoh tauladan bagi rakyat yang dipimpin. Manusia harus menerapkan nilai-nilai keislaman dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan perekonomian dengan tujuan untuk memakmurkan kehidupan dan mensejahterakan masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian- penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil- hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai “dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi”.

Anita, said muhammad, abubakar hamzah, Penelitian yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh” hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh, dan variabel dana alokasi khusus yang memiliki koefisien regresi yang paling besar maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus yang paling besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi aceh.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Muhammad said, Hamzah Abu Bakar, “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh” *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, no. 3, Agustus 2014

Dwi suci, fahmi wibawa, Penelitian yang berjudul “Desentralisasi Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Yogyakarta” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, secara individu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>62</sup>

Dedi tri hianto, penelitian yang berjudul “ dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi jambi” Analisis dilakukan dengan model analisis regresi berganda dengan menggunakan metode GLS dan panel tingkat kabupaten kota di provinsi jambi yang mencakup periode enam tahun sebelum desentralisasi fiskal dan sembilan tahun setelah desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal paska tahun 2001 memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi jambi dibandingkan dengan periode sebelumnya.<sup>63</sup>

Priyo Hadiadi, penelitian ini berjudul “ dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada kabupaten dan kota se jawa-bali)”, Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur dengan perangkat lunak program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, desentralisasi

---

<sup>62</sup> Suciayu Dwi, Wibawa Fahmi, “Desentralisasi Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Yogyakarta” *Jurnal Ekonomi*, vol. 1 no. 1 april 2012

<sup>63</sup> Dedi tri haryanto, “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi” *Tesis*, Januari 2012

fiskal memiliki nilai positif dan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten / kota di Jawa Tengah Propinsi.<sup>64</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Harianto, perbedaan tersebut terletak pada model penelitian yang menggunakan model analisis linier berganda dengan menggunakan metode GLS dan panel tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jambi sedangkan penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dengan perangkat lunak SPSS.

Selanjutnya pada penelitian terdahulu lingkup kajian yang digunakan adalah agregat nasional, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan lingkup kajian agregat regional pada tingkat kabupaten yang merupakan refleksi dan efek dari desentralisasi fiskal terhadap perekonomian lebih difokuskan pada indikator perekonomian daerah Kabupaten Lampung Utara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kajian mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang dibahas dalam perspektif ekonomi Islam.

## **F. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis**

### **a. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan prinsip *by origin* dengan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Wandira menyebutkan bahwa DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam

---

<sup>64</sup>Hadi sasana, "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Se- Jawa Dan Bali)" *Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW* (Terakreditasi). 2005



mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Sasana yang meneliti tentang dampak desentralisasi dengan judul "*Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*". Hasil penelitian disimpulkan bahwa, (1) Dana Alokasi Umum lebih menjanjikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan yang lainnya walaupun desain kebijakan dana alokasi umum tidak mendukung pemerataan ekonomi antar daerah. (2) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak menurunkan Pertumbuhan Ekonomi. (3) Kebutuhan Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpotensi mengurangi tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatkan kesenjangan antar daerah.<sup>65</sup>

Berdasarkan teori diatas dan didukung oleh penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>01</sub> : Dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

H<sub>a1</sub> : Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

#### **b. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Modal dasar desentralisasi fiskal seharusnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi nyatanya, PAD hanya mampu

---

<sup>65</sup>Mohammad Aziz, "Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Malinau" *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, Vol .12 No. 1 Tahun 2016, h. 51

membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Sehingga untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU).<sup>66</sup>

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dapat diukur dengan 2 indikator yaitu celah fiskal dan alokasi dasar.

Pemanfaatan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Fleksibilitas dalam pemanfaatan DAU baik melalui belanja rutin, pembangunan/ infrastruktur/ modal, ataupun belanja lainnya diharapkan akan memunculkan pelaku-pelaku ekonomi baru dalam masyarakat.

Hasil menunjukkan bahwa DAU terbukti berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. DAU akan berimbas pada pembangunan ekonomi regional di daerah tersebut, DAU memegang peranan yang sangat dominan dibandingkan sumber dana lainnya, seperti DAK dan DBH untuk itu diharapkan DAU dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai dari tujuan desentralisasi yaitu mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan. Dana Alokasi Umum lebih menjanjikan pertumbuhan

---

<sup>66</sup>*Ibid*, h. 52

ekonomi dibandingkan dengan yang lainnya walaupun desain kebijakan dana alokasi umum tidak mendukung pemerataan ekonomi antar daerah.

Berdasarkan teori diatas dan didukung oleh penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_{02}$  : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

$H_{a2}$  : Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### c. Pengaruh Dana Alokasi khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana alokasi Khusus digunakan untuk membiayai keperluan tertentu daerah, seperti Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah, Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus.

Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. tujuan dari penggunaan DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Friska Sihite (2009) yang

memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Daerah.<sup>67</sup>

Berdasarkan teori diatas dan didukung oleh penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_{03}$  : Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

$H_{a3}$  : Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

**d. Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana bagi hasil, dana yang bersumber dari APBN berupa pajak dan sumber daya alam, yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan dana transfer antara tingkat pemerintah yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu.

---

<sup>67</sup> Edi Susanto dan Marhamah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Bealnja Daerah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Jawa Timur)" *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2016, h.90

Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu kebutuhan tertentu. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Widya sari yang menyatakan bahwa variabel dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan teori diatas dan didukung oleh penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>03</sub> : Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

H<sub>a3</sub> : Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

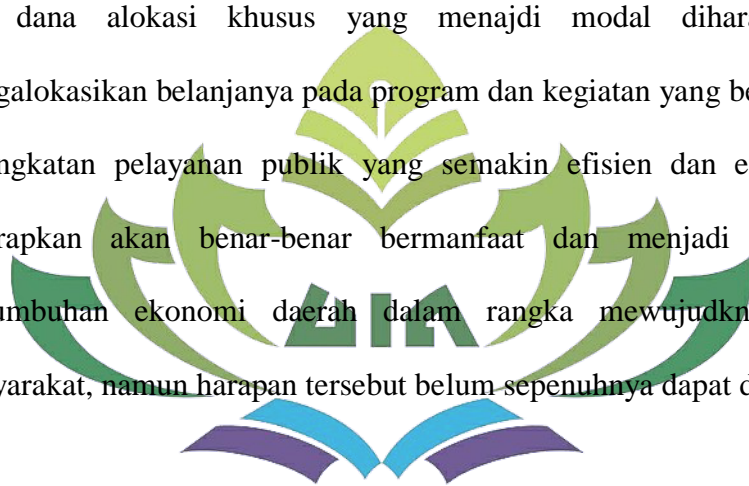
#### G. Kerangka Berfikir

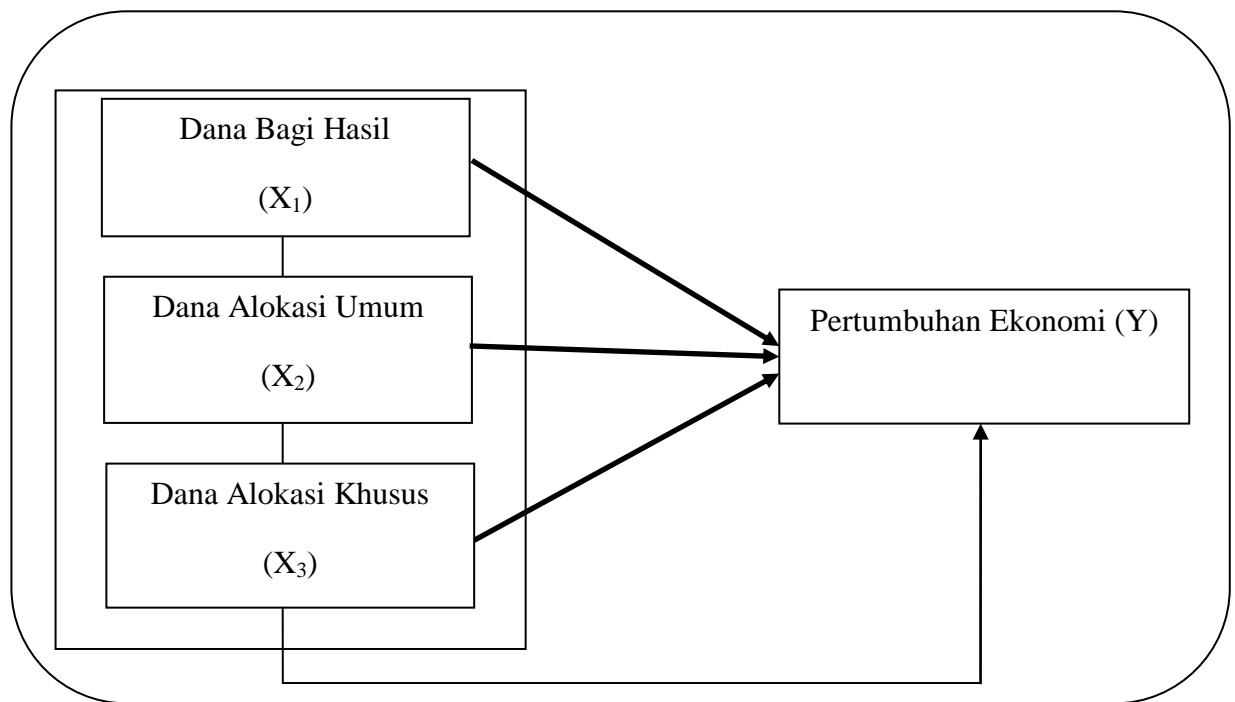
Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan pinjaman daerah. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indiaktor untuk mengukur kebarhasilan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pertumbuhan ekonomi menunjukan sejauh mana aktifitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian.

Dengan adanya pendapatan dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang menjadi modal diharapkan mampu mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif sehingga diharapkan akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun harapan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan.





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

keterangan → = Uji Parsial  
———— = Uji Simultan



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif, metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.<sup>1</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup>

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan gambaran tentang pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara yang menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikannya.

Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat,

---

<sup>1</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 97

<sup>2</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 5

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>3</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lampung Utara dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## B. Sumber Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka secara sepintas lebih mudah untuk diketahui maupun untuk dibandingkan satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup> Data-data kuantitatif dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif ekonomi Islam.

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dengan mengutip literature dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian data-data dari instansi pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Lampung Utara.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

---

<sup>3</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial, dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Jakarta: BumiAksara, 2007)h.47

<sup>4</sup> Joko Subagyo, *Op.Cit*, h.97

### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga berbentuk file yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di website.<sup>5</sup> Data ini bersifat tidak terbatas ruang dan waktu. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data resmi yang diterbitkan oleh badan pusat statistik.

### b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literature terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.<sup>6</sup>

## D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>7</sup> Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh laporan data dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>5</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), h. 231

<sup>6</sup> Wiratna, Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2015), h. 157

<sup>7</sup> Sugiyono. *Op.cit.* h. 174

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel sepuluh tahun yaitu dari tahun 2006-2015.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.

#### **E. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrument, serta sumber pengukuran berasal dari mana.<sup>8</sup>

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN berupa pajak dan sumber daya alam, yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan dana transfer

---

<sup>8</sup>Wiratnasujarweni, *op cit*, h. 77

antara tingkat pemerintah yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu.

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu kebutuhan tertentu.

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Definisi	Skala pengukuran
Independen (X)	Dana Bagi Hasil (X1)  Dana Alokasi Umum (X2)  Dana Alokasi Khusus (X3)	<p>Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN berupa pajak dan sumber daya alam, yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.</p> <p>Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.</p> <p>Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu kebutuhan tertentu.</p>	Rupiah (Rp)
Pertumbuhan ekonomi (Y)	PDRB Kabupaten Lampung Utara	Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya.	persen (%)

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum dan konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.<sup>9</sup>

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel.

Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi berganda, yaitu tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen.<sup>10</sup> Untuk keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang

---

<sup>9</sup>Sutrisno Hadi, “*Metode Research*” (Yogyakarta: ANDI, 2002),h. 42

<sup>10</sup> Lukas Setia Atmaja, “*Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*” (Yogyakarta: ANDI, 2011),h. 177

berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaliknya digunakan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang layak dan baik digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kolmogrov-smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Dengan pengambilan keputusan:

- a) Jika  $\text{Sig} > 0,05$  maka data berdistribusi normal
- b) Jika  $\text{Sig} < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal<sup>11</sup>

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas(independen). Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas maka terdapat problem multikolonearitas (multiko) pada model regresi tersebut. deteksi adanya multikolineritas:

1. Besaran VIF (*Variance iflation Factor*) dan Tolerance

Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah:

- a) Mempengaruhi nilai VIF disekitar angka 1
- b) Mempunyai angka tolerance mendekati 1

---

<sup>11</sup> V. Wiratma Sujarweni, “*SPSS Untuk Penelitian*” (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015),h. 52-56



## 2. Besaran korelasi antara variabel independen

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah dibawah 0,05. Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolinearitas.<sup>12</sup>

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu penelitian dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

Uji Durbin-Watson.

Uji Durbin-watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (First Order Autokorelasi) dan mensyaratkan adanya intercpt (konstanta) dalam model regresi dan tidak adanya variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis yang di uji adalah:

Ho: tidak ada autokorelasi ( $r=0$ )

Ha: ada autokorelasi ( $r \neq 0$ )

---

<sup>12</sup>*ibid*,h. 207.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dan *residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* suatu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pada gambar *scatterplot*. dasar analisis dari heteroskedestisitas melalui grafik plor adalah sebagaiberikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar ke mudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawahnya pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

## 2. Alat Uji Hipotesis

### a. Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi atau  $R^2$  dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa di jelaskan oleh variabel-variabel bebasnya.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan masing-masing independenya itu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi

---

<sup>13</sup>Santososingih, *mengatasi Masalah Statistik Dengan SPS* (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 167

hasil secara parsial dan secara simultan mempengaruhi variabel dependennya itu profitabilitas yang dinyatakan dengan  $R^2$  untuk menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil terhadap PDRB. Sedangkan  $r^2$  untuk menyatakan koefisien determinasi parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

Besarnya koefisien determinasi adalah 0-1, semakin mendekati 0, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen, (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 1 maka, dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel terkait. Angka dari R square didapat dari pengolahan data melalui program spss yang bisa dilihat pada tabel model summary kolom R square.

**b. Uji f Atau Uji Simultan**

Uji f ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ) dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program spss statistik parametric sebagai berikut:

a. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

b. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima

**c. Uji t Uji Parsial**

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara Parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil terhadap PDRB yang merupakan variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS statistic parametric sebagai berikut:

a) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima

b) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

Pada uji t, nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan dari program SPSS pada tabel *coefficients* kolom sig atau *Significance*.

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Regresi linear berganda untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel atau untuk mem-

buktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).<sup>14</sup>

Dimana :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

a = Bilangan Konstanta

B1-B2 = Koefisien Regresi

X1 = Dana Bagi Hasil

X2 = Dana Alokasi Umum

X3 = Dana Alokasi Khusus

e = Standar error

---

<sup>14</sup>Usman, husnainidansetiadi, *pengantarstatistika* (Jakarta : PT BumiAksara, 2003), h. 241

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Lampung Utara adalah salah satu Kabupaten yang secara administratif termasuk dalam provinsi Lampung, dengan batas geografis sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan, sebelah Timur dengan kabupaten Tulang Bawang Barat, sebelah selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten yang luas wilayahnya sekitar 2.725,63 km<sup>2</sup> dengan titik koordinat 4,34-5,06 Lintang Selatan dan 104,30-105,8 Bujur timur ini terdiri atas 23 kecamatan.

##### **2. Sejarah Kabupaten Lampung Utara**

Pada awal masa kemerdekaan, berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1945, Lampung Utara merupakan wilayah administratif di bawah Karesidenan Lampung yang terbagi atas beberapa kawedanan, kecamatan dan marga.

Pemerintahan marga dihapuskan dengan Peraturan Residen 3 Desember 1952 Nomor 153/1952 dan dibentuklah “Negeri” yang menggantikan status marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya berkedudukan di bawah kecamatan. Dengan terjadinya pemekaran beberapa kecamatan, terjadilah suatu negeri di bawah

beberapa kecamatan, sehingga dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan. Status pemerintahan negeri dan kawedanan juga dihapuskan dengan berlakunya UU RI Nomor 18 Tahun 1965.

Berdasarkan UU RI Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, junto UU RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung..

### 3. Geografi Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Lampung. Kabupaten yang beribukota di Kotabumi, berjarak 100 km dari Bandar Lampung (Ibukota propinsi Lampung). Secara administrasi, Lampung Utara terbagi dalam 23 wilayah kecamatan dan 247 desa dengan total luas wilayah 2.725,63 km<sup>2</sup> atau 7,72 persen dari luas Provinsi Lampung. Secara geografis Kabupaten Lampung Utara terletak pada 104040' sampai 105008' Bujur Timur dan 4034' sampai 5006' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara dengan Kabupaten Way Kanan, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah, Sebelah Timur dengan Kabupaten Tulang Bawang, Sebelah Barat dengan kabupaten Lampung Barat.



Sebelah barat Kabupaten Lampung Utara merupakan rangkaian Bukit Barisan yang terdiri dari lereng-lereng curam dan terjal (tujuh persen dari luas Kabupaten Lampung Utara) dengan ketinggian antara 450 – 1.500m dari permukaan laut. Kawasan tersebut umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer/sekunder.

#### **4. Sektor Ekonomi Kabupaten Lampung Utara**

Perekonomian Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh sektor pertanian. Wilayah yang berpenduduk sebanyak 585.731 jiwa ini bermata pencaharian utama pada sektor pertanian. Produksi Padi sawah mengalami peningkatan dari 147.691 ton pada tahun 2010 menjadi 148.528 ton pada tahun 2011 dengan produktivitas sebesar 5,15 ton/ha. Produksi Padi Ladang pada tahun 2011 menurun dibandingkan tahun 2010 dari 39.559 ton menjadi 31.841 ton. Produktivitas Padi Ladang pun menurun dari 3.02 ton /ha pada tahun 2010 menjadi 2.71 ton per ha pada tahun 2011.

Produksi palawija pada tahun 2011 rata-rata menurun dibandingkan tahun 2010, sedangkan produksi sayuran dan buah-buahan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kebutuhan pupuk dan pestisida untuk tahun 2011 tidak seluruhnya dapat terpenuhi, namun demikian untuk pupuk seluruh pengadaan dapat tersalur 100%. Produksi perkebunan sebagian besar komoditi juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 kecuali tebu pada tahun 2011 produksinya mencapai 23.328 ton. Populasi ternak,

baik ternak besar maupun ternak kecil dan unggas meningkat dibandingkan tahun 2010, kecuali itik populasinya menurun cukup tajam. Produksi telur ayam ras juga menurun dari 877.253 kg pada tahun 2010 menjadi 870.680 kg pada tahun 2011, sebaliknya produksi daging meningkat cukup tinggi. Produksi Ikan darat di Lampung Utara pada tahun 2011 mencapai 5.233 Ton baik dari hasil penangkapan di perairan umum maupun pemeliharaan.

## **B. Gambaran Hasil penelitian**

Penelitian ini menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data *Times Series* atau rentang waktu mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) komputer SPSS.17 dengan metode analisis regresi linier berganda. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum dari pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana alokasi khusus kabupaten Lampung Utara dari tahun ke tahun.

### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah

satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi yang merangsang bagi berkembangnya ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar.

Dalam pembahasan ini akan diperhatikan berapa besar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2006-2015 dimana data yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah data PDRB atas dasar harga konstan. Perkembangan PDRB untuk Kabupaten Lampung Utara selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB di Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2006-2015 secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Berdasarkan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha</b>
2006	2.686.689
2007	2.855.121
2008	3.018.011
2009	3.194.205
2010	3.368.212
2011	3.566.685
2012	12.474.337,91
2013	13.636.757,75
2014	15.391.118,83
2015	16.413.13,09

Sumber :Badan Pusat Statistik tahun 2006-2015 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bahwa produk domestik regional bruto dari tahun 2006 hingga 2015 mengalami peningkatan, peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2012. Setiap tahunnya menunjukan arah yang positif selama 10 tahun terakhir, ini memberikan indikasi besarnya pengaruh perekonomian Kabupaten Lampung Utara terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara.

## 2. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN berupa pajak dan sumber daya alam, yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Adapun perkembangan dana bagi hasil Kabupaten Lampung Utara selama periode tahun 2006 sampai dengan 2015 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2006-2015**

NO	Tahun	Dana bagi hasil
1	2006	52.418.867.896,00
2	2007	47.593.237.609,00
3	2008	57.608.155.638,00
4	2009	42.805.546.576,00
5	2010	54.851.833.280,00
6	2011	54.498.061.965,00
7	2012	56.514.202.049,00
8	2013	51.185.042.945,00
9	2014	45.163.652.230,00
10	2015	45.056.956.694,00

Sumber :Badan Pusat Statistik tahun 2006-2015 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah dana bagi hasil selama sepuluh tahun terakhir mengalami naik turun. Penurunan dana bagi hasil terendah pada tahun 2009 sebesar 42.805.546.576,00 akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali, pada tahun 2013-2015 kembali mengalami penurunan.

### 3. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang formula dan perhitungan dana alokasi umumnya ditetapkan sesuai undang-undang. Adapun perkembangan dana alokasi umum Kabupaten Lampung Utara selama periode tahun 2006 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2006-2015**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Dana alokasi umum</b>
1	2006	368.683.000.000,00
2	2007	395.803.000.000,00
3	2008	440.124.311.000,00
4	2009	454.517.555.000,00
5	2010	470.729.922.000,00
6	2011	562.285.756.000,00
7	2012	661.427.439.000,00
8	2013	761.218.384.000,00
9	2014	838.661.589.000,00
10	2015	225.960.000.000,00

Sumber :Badan Pusat Statistik tahun 2006-2015 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dana alokasi umum di Kabupaten Lampung Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan,akan tetapi pada tahun 2015 dana alokasi umum mengalami penurunan yang sangat besar. Jika pada tahun 2014 dana alokasi umum sebesar 838.661.589,00 maka pada tahun 2015 sebesar 225.960.000.000,00.

#### **4. Dana Alokasi Khusus**

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum.

Dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, penentuan daerah tertetu harus memenuhi

kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Adapun perkembangan dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Utara selama periode tahun 2006-2015 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2006-2015**

NO	Tahun	Dana alokasi khusus
1	2006	37.060.000.000,00
2	2007	38.482.000.000,00
3	2008	54.558.000.000,00
4	2009	60.706.000.000,00
5	2010	76.824.900.000,00
6	2011	67.449.600.000,00
7	2012	80.961.800.000,00
8	2013	92.155.100.000,00
9	2014	89.315.410.000,00
10	2015	10.860.000.000,00

Sumber :Badan Pusat Statistik tahun 2006-2015 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat dana alokasi khusus dari tahun 2006-2010 mengalami kenaikan, tetapi ditahun 2011 mengalami penurunan. pada tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan yang sangat besar hingga 92.155.100.000,00 pada tahun 2013 dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan terutama pada tahun 2015 penurunannya sangat jauh.

## C. Analisis Data

### 1. Hasil Uji Asumsi klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaliknya digunakan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian.



Metode yang layak dan baik digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kolmogorov-smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku.

Dengan pengambilan keputusan: Jika  $Sig > 0,05$  maka data berdistribusi normal, Jika  $Sig < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal. Ada dua cara yang sering digunakan untuk menguji normalitas residual, yaitu analisis grafik (normal p-p plot) regresi dan uji one sample kolmogorof-smirnof.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Normalitas**

Sampel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
10	0,921	0,364	Normal

Sumber : Data diolah 2018

Hasil uji normalitas diatas dapat dilihat pada tabel 4.5 bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,921 karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi dengan normal.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat terdapat gangguan atau tidak terhadap data dimasa multikolinieritas terjadi apabila ada korelasi antara variabel independen. Dengan demikian uji ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari gangguan multikolinieritas. Pengujian dalam uji multikolinieritas dengan melihat

nilai VIT (*variance inflation factor*) harus ada dibawah 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Vvariabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Dana Bagi hasil	0,431	2,318	Tidak terjadi multikolineritas
Dana Alokasi Umum	0,166	6,008	Tidak terjadi multikolineritas
Dana Alokasi Khusus	0,203	4,928	Tidak terjadi multikolineritas

Sumber : Data diolah 2018

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa data yang tidak terjadi gejala multikolinearitas antara masing-masing variabel independen dalam model regresi yaitu melihat nilai VIF dan nilai *tolerance*. Hasil perhitungan *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variable independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan *Variance Inflation Factors* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.

#### **b. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi antara sesama variabel bebas yang diurutkan waktu dan ruang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji durbin Watson (DW).

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Sampel	Durbin-Watson	Keterangan
10	2,900	Tidak terjadi autokorelasi

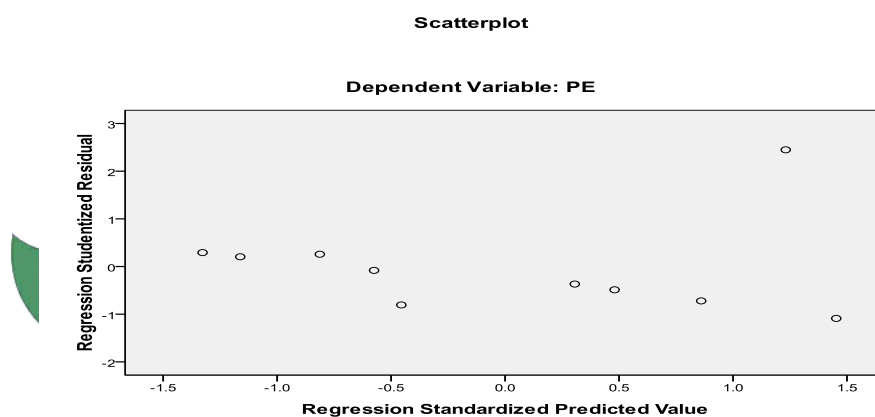
Sumber : Data diolah 2018

Pada tabel 4.7 diatas dapat diketahui nilai durbin Watson (d) sebesar 2,900 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan signifikansi sebesar 5 %. Jumlah sampel (n) 10 dan jumlah variabel independen (k) adalah 4. Maka dari tabel di dapat nilai  $du = 1,7209$  dan nilai  $dl = 1,2848$  oleh karena nilai  $du < dw < 4-du$  atau  $2,4137 < 2,900 < 1,2848$  maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi negatif.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *Variance* dan *Residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot,

regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, titik-titik data yang mengumpul hanya pada diatas atau dibawah saja, penyebaran data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil uji heteroskedastisitas dalam gambar 4.1 sebagai berikut:



**Gambar 4.1**  
**Uji Heteroskedestisitas**

Hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak berpola jadi tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Model pengujian regresi berganda merupakan model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara DAU, DAK, DBH, terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun hasil yang ditunjukkan dari uji regresi berganda pada variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.8**  
**Ringkasan Uji Regresi Berganda**

Variabel	Prediksi	Koefisien	t <sub>hitung</sub>	Signifikansi	Kesimpulan
(Constant)		1,188		0,199.	
DBH	positif	-0,634	-1,136	0,299	Tidak Berpengaruh
DAU	Positif	-0,682	-0,759	0,477	Tidak Berpengaruh
DAK	Positif	0,433	0,532	0,614	Tidak Berpengaruh
F <sub>hitung</sub> = 0,482					
Signifikansi = 0,707 <sup>a</sup>					
Adjusted R <sup>2</sup> = -0,208					
R Square = 0,194					

Sumber :Data diolah 2018

$$Y = 1,188 - 0,634 X_1 - 0,682 X_2 + 0,433 X_3 + e$$

X<sub>1</sub> = Dana Bagi Hasil

X<sub>2</sub> = Dana Alokasi Umum

X<sub>3</sub> = Dana Alokasi Khusus

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar 1,188 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya bernilai nol, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 1,188 satuan.
- b. Koefisien regresi variabel dana bagi hasil sebesar -0,634 menunjukkan bahwa jika variabel dana bagi hasil meningkat satu satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -0,634 satuan dengan ketentuan variabel lainnya konstan.
- c. Koefisien regresi variabel dana alokasi umum sebesar -0,682 menunjukkan bahwa jika variabel inflasi meningkat satu satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar -0,682 satuan.
- d. Koefisien regresi variabel dana alokasi khusus sebesar 0,433 menunjukkan bahwa jika variabel dana alokasi khusus meningkat satu satuan maka variabel dana alokasi khusus akan mengalami peningkatan sebesar 0,433 satuan dengan ketentuan variabel lainnya konstan.

### 3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada dasarnya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Model koefisien determinasi memiliki kelemahan yakni bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Dalam penelitian ini menggunakan nilai dari *Adjusted R<sup>2</sup>* untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik. Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi atau *Adjusted R<sup>2</sup>* diperoleh nilai sebesar -0,208 yang artinya adalah besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas dalam hal ini menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 20,8% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

#### 4. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Utara secara bersama-sama. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% ( $=0,05$ ).

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui hasil uji signifikan simultan (Uji F) diatas menunjukkan nilai sig.  $0,035 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa:

- a) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak
- b) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $h_0$  diterima



Sehingga dapat ditunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi karena probabilitas  $0,035 < 0,05$ .

## 5. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dapat mempengaruhi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini uji hipotesis digunakan untuk mengetahui adanya masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah pengaruh Dana Bagi Hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah jika nilai signifikansi sebesar  $\alpha = 0,05$  (5%), maka  $H_0$  dapat ditolak dengan demikian  $H_a$  dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut hasil uji t pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen :

Berdasarkan pengujian regresi secara parsial pada tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil tidak pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Utara. Variabel Dana Bagi Hasil dengan nilai signifikan lebih Kecil dari  $\alpha 0.05$  % ( $-0,634 < 0,05$  ).

Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Utara. Variabel Dana Alokasi Umum dengan nilai signifikan lebih besar dari  $\alpha$  0,05 ( $-0,682 > 0,05$ ). Variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Utara. Variabel Dana Alokasi Khusus dengan nilai signifikan lebih besar dari  $\alpha$  0,05 ( $0,433 > 0,05$ ).

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara Parsial.**

Pengaruh secara parsial merupakan pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat variabel dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara tahun 2006-2015 akan diuraikan sebagai berikut :

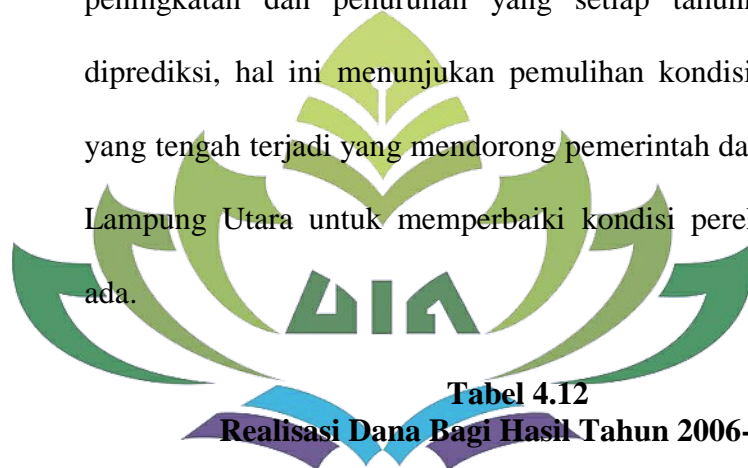
##### **a. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN berupa pajak dan sumber daya alam, yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Variabel Dana bagi hasil dengan nilai signifikan lebih besar dari  $\alpha$  0,05 ( $0,299 > 0,05$ ). Yang menunjukkan bahwa variabel dana

alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Utara. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima

Dalam penelitian ini, Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Utara. Berikut ini adalah realisasi dana bagi hasil kabupaten Lampung Utara pada tahun 2006-2015 menunjukkan peningkatan dan penurunan yang setiap tahunnya tidak bisa diprediksi, hal ini menunjukkan pemulihan kondisi perekonomian yang tengah terjadi yang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang ada.



NO	Tahun	Dana bagi hasil
1	2006	52.418.867.896,00
2	2007	47.593.237.609,00
3	2008	57.608.155.638,00
4	2009	42.805.546.576,00
5	2010	54.851.833.280,00
6	2011	54.498.061.965,00
7	2012	56.514.202.049,00
8	2013	51.185.042.945,00
9	2014	45.163.652.230,00
10	2015	45.056.956.694,00

Sumber :Badan Pusat Statistik tahun 2006-2015 (data diolah)

Dari tabel 4.12 di atas, bahwa realisasi dana bagi hasil pada tahun 2006-2015 mengalami fluktuatif. Hal ini terjadi karena dana bagi hasil yang diperoleh menyesuaikan dengan perekonomian

yang terjadi. Seperti pada tahun 2014 dana realisasi dana bagi hasil sebesar Rp 45.163.652.23 yang merupakan dana bagi hasil yang terkecil selama 10 tahun terakhir, hal itu dikarenakan tahun 2014 terjadi (penurunan pendapatan negara bukan pajak).migas yang akan dibagihasilkan turun signifikan. DBH diturunkan sebesar 15,1 triliun dari besaran anggaran yang ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2014, beberapa komponen DBH yang mengalami penurunan dalam RAPBN tahun 2014 adalah DBH pph pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, DBH pajak bumi dan bangunan, dan DBH migas.

Pengalokasian dana bagi hasil kurang berkontribusi maksimal bagi pengeluaran pemerintah kabupaten Lampung Utara, seperti pembangunan fasilitas sarana publik (bidang infrastruktur, irigasi, pelatihan-pelatihan teknis, penelitian dan sebagainya) yang langsung menyentuh atau di nikmati masyarakat dalam waktu pendek. Selain itu besarnya kuantitas realisasi dana bagi hasil bagi penerimaan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam 10 tahun ini tidak merespon secara menyeluruh (akumulasi) terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana proses *multiplier effect* secara nyata pada sumber daya manusia Kabupaten Lampung Utara yang bergerak di berbagai sektor produk domestic regional bruto (PDRB).

Selain itu, ketidak sinambungan alokasi serta kualitas dari dana bagi hasil pada pengeluaran pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan berbagai kebijakan melalui program-program pembangunan untuk sektor publik yang sesungguhnya di harapkan secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, khusus nya sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebagai faktor produksi bagi aktifitas perekonomian.

Adapun perbandingan penelitian ini dengan yang terhadulu oleh Pujiati (2008) dalam sebuah jurnal yang berjudul “ *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Keresidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal 2002-2006*”. Hasil dari penelitian tersebut bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal dalam proses pertumbuhan ekonomi, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di keresidenan semarang tahun 2002-2006.

#### **b. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dari Dana Perimbangan yang sering disebut sebagai dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi sehingga ketimpangan ekonomi antar daerah yang terjadi dapat diatasi.

Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Variabel Dana Alokasi Umum dengan nilai signifikan lebih besar dari  $\alpha$  0,05 ( $0,477 > 0,05$ ). Yang menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lampung Utara. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima.

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa perkembangan dana alokasi umum di kabupaten Lampung Utara tahun 2006-2015 mengalami peningkatan namun, laju pertumbuhan tidak serta meningkat melainkan masih fluktuatif. Adapun perkembangan dana alokasi umum di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2006-2015 adalah sebagai berikut.

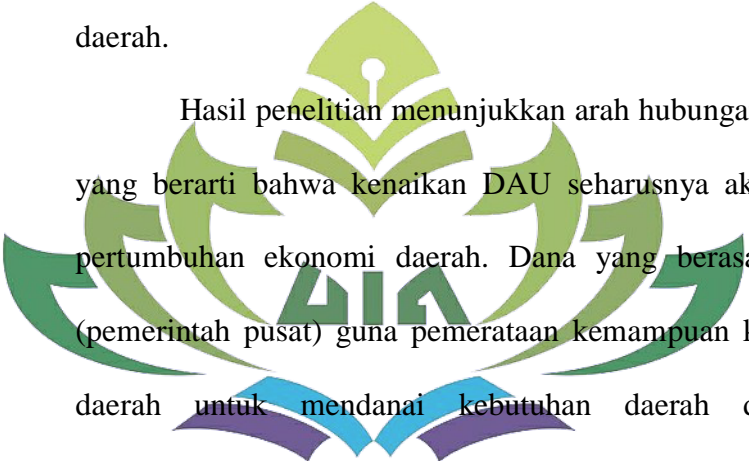
**Tabel 4.15**  
**Realisasi Dana Alokasi Umum**

NO	Tahun	Dana alokasi umum
1	2006	368.683.000.000,00
2	2007	395.803.000.000,00
3	2008	440.124.311.000,00
4	2009	454.517.555.000,00
5	2010	470.729.922.000,00
6	2011	562.285.756.000,00
7	2012	661.427.439.000,00
8	2013	761.218.384.000,00
9	2014	838.661.589.000,00
10	2015	225.960.000.000,00

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2006-2015 (data diolah)

berdasarkan tabel 4.15 bahwa pertumbuhan dana alokasi umum pada tahun 2006-2015 sangat bervariasi setiap tahunnya.

Seharusnya dengan peningkatan DAU akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Banyak dana yang masuk ke dalam Kabupaten Lampung Utara dengan adanya pengalokasian DAU dari pemerintah Pusat. Jika banyak dana (uang) yang masuk maka ekonomi akan lebih maju, daerah akan semakin produktif, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.



Hasil penelitian menunjukkan arah hubungan yang negatif, yang berarti bahwa kenaikan DAU seharusnya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dana yang berasal dari APBN (pemerintah pusat) guna pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, tidak dilakukan secara maksimal oleh daerah. Banyak dana alokasi umum yang dibelanjakan di luar Kabupaten Lampung Utara. Sehingga kenaikan DAU justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam penelitian ini, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Utara. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan dana alokasi umum masih belum signifikan oleh karenanya sebaiknya pemerintah memprioritaskan alokasi dan dana alokasi



umum pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edi Susanto dan Marhamah dalam jurnal yang berjudul, “pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja daerah sebagai variabel moderating (studi empiris pada 28 Kab dan 9 Kota di Jawa Timur)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi bisa disebabkan oleh porsi dana alokasi umum kurang mencerminkan pembentukan pada PDRB disektor basis, khususnya pada *agriculture* dan *manufacture*. Dana yang diterima pemerintah lebih banyak untuk pemenuhan belanja tidak langsung aparatur dan sebagian lagi pemenuhan infrastruktur jalan yang sampai saat ini bebannya masih sangat besar. Akan tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endrawati yang menunjukkan hasil yang berbeda bahwasanya dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengujian regresi secara parsial menunjukkan bahwa Variabel Dana Alokasi Khusus dengan nilai signifikan lebih besar dari  $\alpha 0,05$  ( $0,614 > 0,05$ ), yang menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Utara. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima.

Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dorani Analisis Pengaruh Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008, Hal ini disebabkan karena dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kurang dioptimalkan untuk berbagai aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian dan pada akhirnya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan dana alokasi khusus kabupaten lampung utara selama kurun waktu 2016-2015 selalu mengalami peningkatan namun proporsi terhadap dana alokasi khusus tidak serta meningkat, peningkatan dana alokasi khusus tersebut untuk memenuhi kelengkapan kegiatan pemerintahan yang berfungsi dalm memberi pelayanan kepada masyatrakat. Dengan demikian dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikabupaten Lampung Utara. Adapun realisasi dana alokasi khusus sebagai berikut :

**Tabel 4.16**  
**Realisasi dana alokasi khusus**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Dana alokasi khusus</b>
1	2006	37.060.000.000,00
2	2007	38.482.000.000,00
3	2008	54.558.000.000,00
4	2009	60.706.000.000,00
5	2010	76.824.900.000,00
6	2011	67.449.600.000,00
7	2012	80.961.800.000,00
8	2013	92.155.100.000,00
9	2014	89.315.410.000,00
10	2015	10.860.000.000,00

Sumber :Badan Pusat Statistik tahun 2006-2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa dana alokasi khusus pemerintah Kabupaten Lampung Utara berdasarkan tinjauan keuangan daerah Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2010-2014 menunjukan belanja tidak langsung setiap tahunnya dibandingkan belanja langsung. Berdasarkan data statistik keuangan daerah provinsi Lampung bahwa rasio belanja operasi

kabupaten/kota se Provinsi Lampung padatahun 2015 sebesar 76,30 persen menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja lebih banyak untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Berikut ini adalah realisasi belanja pemerintah kabupaten lampung utara tahun 2010-2014:

**Tabel 4.17**  
**Realisasi belanja pemerintah kabupaten lampung utara tahun 2010-2014 (milyar Rp)**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>
2010	259,94	480,82
2011	340,62	550,94
2012	326,39	620,09
2013	433,83	675,47
2014	436,87	726,33

Sumber :Badan Pusat Statistik tahun 2010-2014 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.17 di atas realisasi belanja pemerintah kabupaten lapung utara lebih banyak ke alokasi tidak langsung

Hal ini disebabkan karena dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kurang dioptimalkan untuk berbagi aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian dan pada akhirnya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian ini Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh andri widianto, dkk dalam jurnal yang berjudul, “pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja Modal

terhadap pertumbuhan ekonomi Dan tingkat kemiskinan (studi kasus pada kota tegal).”yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan bahwa tidak semua daerah mendapatkan DAK karena DAK digunakan untuk membiayai keperluan tertentu daerah, seperti Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah, terlebih di tahun 2006 silam, di kabupaten Sidoarjo telah terjadi bencana Lumpur Lapindo yang mengakibatkan kerugian material. Diharapkan dengan adanya DAK akan meningkatkan kembali perekonomian daerah sehingga taraf hidup masyarakat meningkat. Terlebih pada Kabupaten Sidoarjo yang mengalami kerugian cukup besar.

## **2. Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan.**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan model regresi linier berganda dimana menggunakan Uji Signifikan Simultan (Uji F) diperoleh hasil nilai prob. (*F-statistik*) sebesar 0,707 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak untuk menjelaskan pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel X1 (Dana bagi hasil), X2 (Dana alokasi umum), X3 (Dana alokasi khusus) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi) di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2006-2015. Maka dapat dikatakan dalam penelitian ini  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak.

Selanjutnya dari analisis regresi linier berganda diperoleh nilai R sebesar 0,194. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu variabel dana bagi hasil (X1), dana alokasi umum (X2), dan dana alokasi khusus (X3) mempunyai keeratan hubungan dengan variabel pertumbuhan ekonomi (Y) dan memiliki kontribusi sebesar 19,40%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri Widiyanto, dkk, dimana dalam penelitiannya bahwa variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan prinsip *by origin* dengan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Wandira menyebutkan bahwa dana bagi hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum (DAU) dapat diukur dengan 2 indikator yaitu celah fiskal dan alokasi dasar. Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Tujuan dari penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan.

### **3. Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara Periode 2006-2015**

Banyak para ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktifitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi islam adalah sama dengan konvensional, hanya saja ada tambahan unsur zakat



dalam perhitungan GNP, PDB atau PDRB dalam pembahasan ekonomi islam dapat dijadikan suatu ukuran untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan perkapita masyarakat yang menjadi parameter *falah* didalamnya.

Dari data yang ada di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2006-2015 menunjukan bahwa total PDRB Kabupaten Lampung Utara terus meningkat dan diikuti dengan pendapatan perkapita yang meningkat setiap tahunnya. Pada sisi lain, islam juga memandang pentingnya pemerataan karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. Adapun perkembangan jumlah Produk domestik regional bruto pada tahun 2006 -2015 sebagai berikut:

**Tabel 4.18**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Utara Atas**  
**Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (dalam juta ruiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Berdasarkan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha</b>
2006	Rp. 2.686.689
2007	Rp. 2.855.121
2008	RP. 3.018.011
2009	Rp. 3.194.205
2010	Rp. 3.368.212
2011	Rp. 3.566.685
2012	Rp. 12.474.337,91
2013	Rp. 13.636.757,75
2014	Rp. 15.391.118,83
2015	Rp. 16.41313,09

Sumber :Badan Pusat Statistik tahun 2006-2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa bahwa produk domestik regional bruto dari tahun 2006 hingga 2015 mengalami peningkatan, peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2012. Setiap tahunnya menunjukan arah yang positif selama 10 tahun terakhir, ini memberikan indikasi besarnya pengaruh perekonomian Kabupaten Lampung Utara terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan data dari BPS dana bagi hasil dari tahun 2006-2015 mengalami fluktuatif dan cenderung kecil dibandingkan kabupaten/kota yang ada di provinsi lampung, hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan dana bagi hasil setiap tahunnya pemerintah harus bekerja keras semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan potensi daerah yang tersedia serta firman Allah dalam QS At-taubah ayat 105 tentang bekerja keras.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*<sup>1</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah setiap manusia diwajibkan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik individu maupun

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-qur'an dan Terjemahnya" (PT Riels grafika, 2009), h.87

kelompok. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk bekerja mengurus kegiatan daerah yang tujuannya untuk memaksimalkan potensi daerah yang diamanatkan dapat digunakan untuk kemaslahatan daerah tersebut.

Berbicara tentang dana bagi hasil dikabupaten Lampung Utara lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, dan lain sebagainya sehingga seperti bidang lain kurang mendapat perhatian seperti pendidikan dan kesehatan karena pemerintah hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur, karena seharusnya distribusi anggaran harus dialokasikan ke semua bidang yang menjadi fokus pemerintah, seperti firman Allah dalam QS An-nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*<sup>2</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah berperilaku adil kepada manusia baik berupa tindakan maupun rencana yang akan dilakukan. Dan keadilan tersebut harus membawa kemaslahatan untuk masyarakat hal itu ditunjukkan dengan pembagian dana alokasi dana bagi hasil yang tidak

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-qur'an dan Terjemahnya" (PT Riels grafika, 2009), h.87

terfokus kepada infrastruktur tetapi lebih kesemua bidang agar masyarakat lebih merasakan manfaatnya.

Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun meningkatnya pertumbuhan ekonomi masih tidak selalu diiringi dengan meningkatnya pendapatan perkapita kabupaten Lampung Utara. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidak signifikan pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi peningkatan jumlah pendapatan perkapita yang dilihat berdasarkan data BPS. Hal ini juga disebabkan oleh tidak meratanya distribusi pendapatan. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Karl Marx yang menyatakan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan yang semakin timpang.

Berdasarkan tabel 4.13 dijelaskan bahwa pendapatan perkapita Lampung Utara tahun 2006-2015 masih berfluktuatif. Pendapatan perkapita tertinggi pada tahun 2014 dengan nilai sebesar 19,532,678 dan terendah pada tahun 2006 dengan nilai 6,171,663.

**Tabel 4.19**  
**Total Pendapatan Perkapita Kabupaten Lampung Utara**  
**Tahun 2006-2015**

Tahun	Total Pendapatan
2006	6,171,663
2007	7,711,472
2008	9,020,392
2009	8,076,164
2010	10,481,160
2011	11,546,827
2012	13,983,829
2013	16,364,493
2014	19,532,073
2015	14,206,678

Sumber: BPS kabupaten lampung utara (data diolah)

Berdasarkan data diatas terjadi ketimpangan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang seharusnya tidak boleh terjadi karena dalam Hal ini sejalan dengan firman Allah pada surat al-hasr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan

*apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”*.<sup>3</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam pembangunan harus merata dengan melihat pendapatan perkapita yang ada agar tidak terjadi ketimpangan antara masyarakat satu dengan yang lainnya dan membagi porsi kegiatan yang berorientasi pada pembangunan, dan menekankan perintah untuk mendistribusikan pendapatan kepada orang-orang yang mengalami kekurangan, karena islam tidak menghendaki terkonsentrasinya pendapatan kepada daerah-daerah , tetapi harus merata. Pemerataan yang dimaksud tidak sama baik kualitas maupun kuantitas tetapi harus menekankan pada aspek darurat dengan melihat siapa yang paling membutuhkan dan pemerataan yang dimaksud dapat tercapai agar yang lapang hartanya tidak semakin lapang dan yang sempit tidak semakin sempit.

Adanya hubungan positif antara pendapatan perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi bahwa setiap penurunan tingkat pendapatan perkapita akan diikuti penurunan tingkat PDRB. Jika PDRB terus meningkat, maka pendapatan akan bertambah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pendapatan perkapita itu sendiri.

Dalam ekonomi islam pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-qur’an dan Terjemahnya” (PT Riels grafika, 2009), h.546

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam harus menekankan aspek aksiologis yang lebih menjunjung tinggi nilai dan moral yang tujuan kepada pertumbuhan ekonomi yang ada tidak hanya kesejahteraan materi tetapi lebih diorientasikan kepada kesejahteraan dunia akhirat. Dalam islam tidak diperbolehkan konsumsi modal yang berlebihan dan melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia. Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik haruslah ada sasaran yang dicapai dengan pengorbanan yang dilakukan tanpa menyakiti orang lain. Diantaranya adalah meningkatkan pendapatan perkapita yang diimplementasikan melalui pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk hidup misalnya makanan, perumahan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

Berdasarkan teori yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Utara adalah teori Adam Smith yang menyatakan modal memegang peran penting, menurut Adam Smith akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan bagian tertentu dari GDP semakin banyak yang ditabung dan di investasikan maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat.

Melihat dari anggaran dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum yang ada di Kabupaten Lampung Utara yang cukup besar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar



modal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Lampung Utara maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonominya, hal ini sudah sesuai dengan teori Adam Smith yang menyatakan akumulasi modal memegang peran penting dan menentukan cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di tinjau dari perspektif ekonomi islam di kabupaten lampung utara tahun 2006-2015 adalah sebagai berikut :

1. Variabel dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara padatahun 2006-2015. Dengan demikian maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya, dana bagi hasil berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomia akan tetapi dana bagi hasil tersebut tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena masih kurang maksimal bagi pengeluaran pemerintah Kabupaten Lampung Utara seperti pembangunan fasilitas sarana publik yang sesungguhnya diharap kan secara langsung bersentuhan dengan masyarakat khususnya sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebagai faktor produksi bagi aktifitas perekonomian.
2. Variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2006-2015 dengan demikian maka  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima. Hal ini menunjukan bahwa dana alokasi umum belum dimanfaatkan secara maksimal dan disebabkan oleh porsi dana alokasi umum kurang mencerminkan

pembentukan PDRB disektor basis, khusus nya pada *agliculture* dan *manufacture*, dana yang diterima pemerintah lebih banyak untuk pemenuhan belanja tidak langsung dan sebagian lagi untuk pemenuhan infrastrukturj alan yang saat ini bebannya masih sangat besar.

3. Variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2006-2015. Dengan demikian maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Hal ini disebabkan karena dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kurang dioptimalkan untuk berbagi aktivitas padasektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industry dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian dan pada akhirnya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap variabel terikatnya itu pertumbuhan ekonomi berpengaruh. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel  $X_1$  (Dana bagi hasil),  $X_2$  (Dana alokasi umum),  $X_3$  (Dana alokasi khusus) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel  $Y$  (pertumbuhan ekonomi) di Kabupaten Lampung Utara padatahun 2006-2015.
5. Pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan social secara kekal. Keadaan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara dari sisi dana bagi hasil, dana aloksi umum dan dana lokasi khusus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi

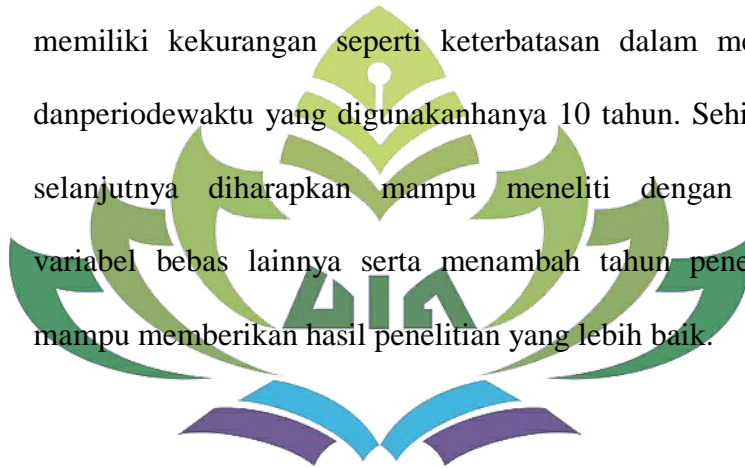
pemerataannya belum tercapai secara maksimal, selain itu devisa anggaran juga mempengaruhi jumlah belanja pemerintah. Dalam islam penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Hal ini berkaitan denangan pengoptimalan keuangan publik. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk patuh dalam membayar pajak maupun zakat yang penerimaan pemerintah tersebut dialokasikan guna pembangunan ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi islam harus menekankan aspek aksiologis yang lebih menjunjung tinggi nilai dan moral yang tujuan kepada pertumbuhan ekonomi yang ada tidak hanya kesejahteraan materi tetapi lebih diorientasikan kepada kesejahteraan dunia akhirat..

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dan dari kesimpulan yang didapat maka, beberapa saran diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi serta mengalokasikan anggaran daerah kebelanja yang lebih untuk meningkatkan perekonomian seperti alokasi belanja modal untuk sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas public seperti pembangunan, infrastruktur dan lain-lain.

2. Bagi pemerintah kabupaten lampung utara dalam mengalokasikan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara lebih efektif dan efisien agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ada pendapatan perkapita dan lebih bisa berkontribusi langsung pada semua lapisan masyarakat.
3. Bagi akademisi dan peneliti elanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi mengajarnya dan penelitian. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data danperiodewaktu yang digunakanhanya 10 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambahkan variabel bebas lainnya serta menambah tahun penelitian sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010
- , *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : UUP STIM YKPN, 2015
- , *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2015
- A.W. Widjaja, *otonomi daerah dan daerah otonom*, Jakarta : PT Raja grafindo persada, 2002
- Atmaja Lukas Setia, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: ANDI, 2011
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahnya*, PT Riels grafika, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama cetakan ke-empat, 2011
- Djojohadikusumo Sumitro, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1994
- Gusfahmi, *pajak menurut syari'ah*, Jakarta: Rajawali pers, 2011
- hakim Lukman, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Huda Nurul, *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta : Kencana, 2012
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: ANDI, 2002
- Jusuf SK, *otonomi daerah dipersimpangan jalan* (Jakarta : cetakan kedua pustaka spirit, 2012), h. 29
- Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- M. Rianto Nur, *pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung: Pustaka setia, 2015
- M.L.Jhingan, *ekonomi pembangunan dan perencanaan*, Jakarta: PT raja grafindo persada, 2012

P3EI. *Ekonomi islam*, Jakarta: rajawali pers, 2011

Raharjo Adisasmita, *teori-teori pembangunan ekonom, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wiayah, cetakan pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik*, jakarta, Rineka Cipta, 2006

Sujarweni Wiratna, , *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2015

Sujarweni V. Wiratma, *SPSS Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015

singih Santoso, *mengatasi Masalah Statistik Dengan SPSS*, Jakarta: Gramedia, 2004

Todaro Michael p., Stephen c. smith, *pembangunan ekonomi edisi ke sebelas jilid 1*, Jakarta: Erlangga. 2011

Todaro Michael, *pembangunan ekonomi didunia ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2000  
Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Usman, husnaini dan setiadi, *pengantar statistika*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003

Wibowo Sukarno, Dedi supriadi, *ekonomi mikro islam*, Bandung: pustaka setia, 2013

Yuliati, *akuntansi sektor public catatan kelima*, Jakarta, salemba empat, 2000

Zuriah Nurul, *Metode Penelitian Sosial, dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

#### **Jurnal:**

Arda Riski, Dini Habsari, *Pengaruh Pendapatan Hasil Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2012)* Jurnal e-proceeding of management Vol 2 Nomor 3, Tahun 2015



Almizan, *Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal kajian ekonomi Islam Vol 1 Nomor 2, Tahun 2016

Any Setianingrum, *Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam*, Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.1 Bulan Januari Tahun 2013

Andi famrizal, *Analisis Faktor Ekonomi Dan Faktor Non Ekonomi Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 8, Agustus 2017

Abdullah abdul Husain at-taqiri, *ekonomi islam* , Magistra insania press: Yogyakarta, 2004

Almizan, *pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam*, jurnal kajian ekonomi islam, vol 1, nomor 2, juni-desember 2016

Dedi tri haryanto, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi*, Tesis, Januari 2012

Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah Studi Kasus Jawa Barat, [www.Academia.Edu/524078](http://www.Academia.Edu/524078), diakses Pada Tanggal 18 Mei 2018

Edi Susanto dan Marhamah, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Bealnja Daerah Sebagai Variabel Moderating(Studi Empiris Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Jawa Timur)*. Jurnal STIE Semarang Vol 8 Nomor 1, Tahun 2016

Fitrah Afrizal, *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi*, Makasar, 2012

Hadi sasana, *analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dikabupaten/kota provinsi jawa tengah*, Dinamika pembangunan, vol 3 nomor 2, 2006

Hadi hasani, *analisis dampak pertumbuhan ekonomi kesenjangan antara daerah dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan dikabupaten/kota provinsi jawa tengah dalam era desentralisasi fiskal*, jurnal bisnis dan ekonomi, vol.16 no.1, 2009

Muhammad said, Hamzah Abu Bakar, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 2, nomor 3, Agustus 2014

M. Makhfudz, *Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum Vol. 3 No.2, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Muhammad rusyidi, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Ekonomi balance, Volume 7 No. 1, Juni 2011

Mohammad Aziz, *Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Malinau*, Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen, Vol 12 Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan menteri keuangan nomor 191/peraturan menteri keuangan 05. 2011, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses pada tanggal 15 juli 2018

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 44 tahun 2012 tentang dana darurat, [www.sipuu.setkab.go.id](http://www.sipuu.setkab.go.id), diakses pada tanggal 15 juli 2018

Sandi Hidayat Noor, *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah di jawa timur*, jurnal ilmu ekonomi, Vol 2 nomor 1, januari 2016

Suciayu dwi, Wibawa fahmi, *Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Yogyakarta*, jurnal ekonomi, vol 1 nomor 1 april 2012

Widiyarta, Agus. *Desentralisasi Fiskal Dalam Pendanaan Pembangunan Daerah*. Vol. 2, No. 2. Januari 2003

Yuli Adriansyah, *menuju desentralisasi kebijakan ekonomi dalam islam: pengalaman dinasti 'usmaniyyah abad 16-18 M dan Indonesia dimasa orde baru*, (jurnal Al-amwal vol.9 nomor 1, 2017

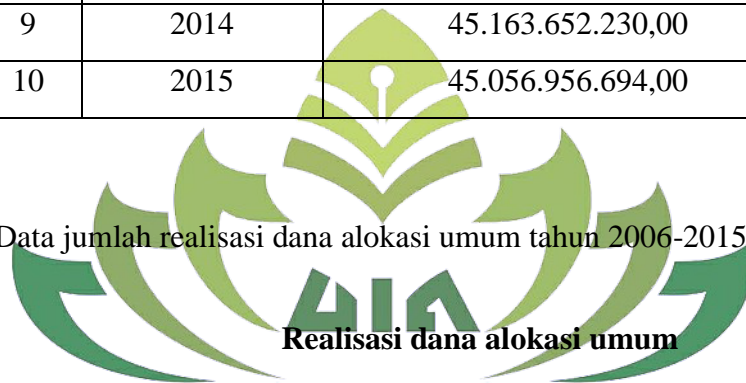
Zainal abiding, *meneropong konsep pertumbuhan ekonomi (telaah atas kontribusi system ekonomi islam atas system ekonomi konvensional)*. Jurnal al-ihkam, Vol 7, nomor 2, desember 2012

Lampiran 1. Data Jumlah realisasi dana bagi hasil tahun 2006-2015

**Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2006-2015**

NO	Tahun	Dana bagi hasil
1	2006	52.418.867.896,00
2	2007	47.593.237.609,00
3	2008	57.608.155.638,00
4	2009	42.805.546.576,00
5	2010	54.851.833.280,00
6	2011	54.498.061.965,00
7	2012	56.514.202.049,00
8	2013	51.185.042.945,00
9	2014	45.163.652.230,00
10	2015	45.056.956.694,00

Lampiran 2. Data jumlah realisasi dana alokasi umum tahun 2006-2015



NO	Tahun	Dana alokasi umum
1	2006	368.683.000.000,00
2	2007	395.803.000.000,00
3	2008	440.124.311.000,00
4	2009	454.517.555.000,00
5	2010	470.729.922.000,00
6	2011	562.285.756.000,00
7	2012	661.427.439.000,00
8	2013	761.218.384.000,00
9	2014	838.661.589.000,00
10	2015	225.960.000.000,00

Lampiran 3. Data jumlah realisasi dana alokasi khusus tahun 2006-2015

**Realisasi dana alokasi khusus**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Dana alokasi khusus</b>
1	2006	37.060.000.000,00
2	2007	38.482.000.000,00
3	2008	54.558.000.000,00
4	2009	60.706.000.000,00
5	2010	76.824.900.000,00
6	2011	67.449.600.000,00
7	2012	80.961.800.000,00
8	2013	92.155.100.000,00
9	2014	89.315.410.000,00
10	2015	10.860.000.000,00

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara 2006-2015

**Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Utara**

<b>Tahun</b>	<b>Laju pertumbuhan</b>
<b>2006</b>	5,79
<b>2007</b>	6,27
<b>2008</b>	5,69
<b>2009</b>	5,85
<b>2010</b>	5,45
<b>2011</b>	5,89
<b>2012</b>	6,03
<b>2013</b>	5,95
<b>2014</b>	5,80
<b>2015</b>	5,43

## Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas

### Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.68697003
Most Extreme Differences	Absolute	.291
	Positive	.291
	Negative	-.139
Kolmogorov-Smirnov Z		.921
Asymp. Sig. (2-tailed)		.364

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Lampiran 6. Hasil Uji Multikolinearitas



### Hasil Pengujian Multikolnieritas

Coefficients<sup>a</sup>

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.188	.824		1.442	.199		
	DBH	-4.863	4.280	-.634	-1.136	.299	.431	2.318
	DAU	-2.104	2.772	-.682	-.759	.477	.166	6.008
	DAK	.454	.854	.433	.532	.614	.203	4.928

a. Dependent Variable: PE

Lampiran 7. Hasil Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.441 <sup>a</sup>	.194	-.208	.84136	2.900

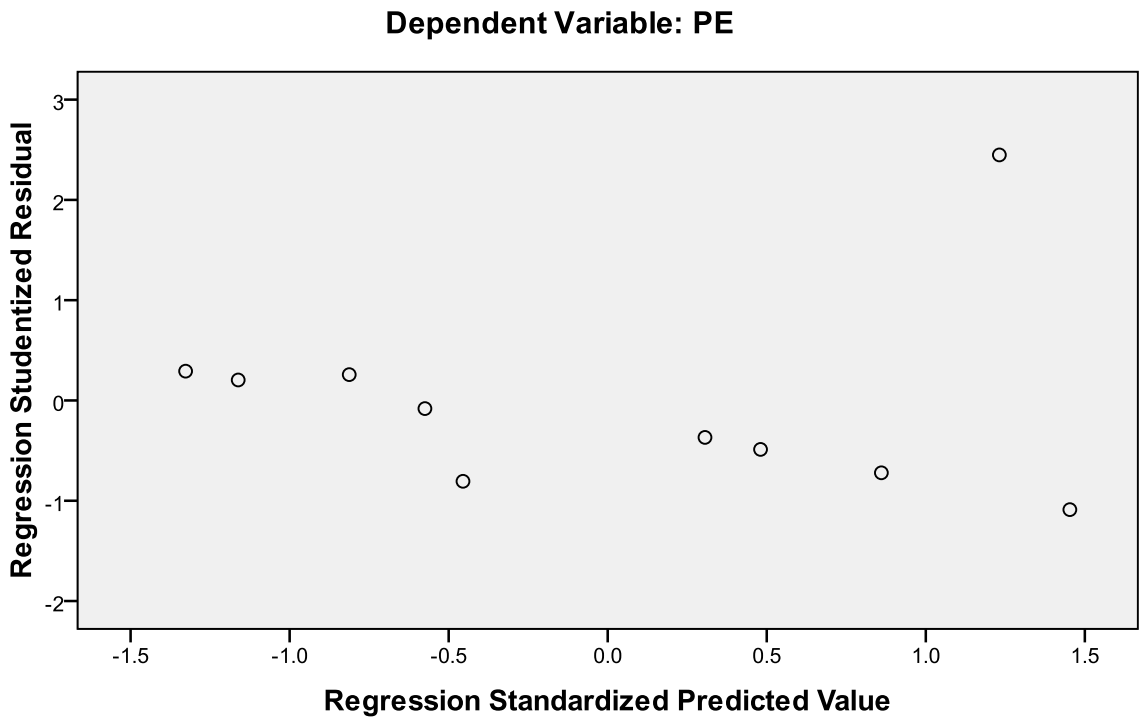
a. Predictors: (Constant), DAK, DBH, DAU

b. Dependent Variable: PE

Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskdastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas

Scatterplot



## Lampiran 9. Hasil Uji T

### Hasil Uji T

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.188	.824		1.442	.199		
DBH	-4.863	4.280	-.634	-1.136	.299	.431	2.318
DAU	-2.104	2.772	-.682	-.759	.477	.166	6.008
DAK	.454	.854	.433	.532	.614	.203	4.928

a. Dependent Variable: PE

## Lampiran 10. Hasil uji F



### Hasil Uji F

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.025	3	.342	.482	.707 <sup>a</sup>
	Residual	4.247	6	.708		
	Total	5.272	9			

a. Predictors: (Constant), DAK, DBH, DAU

b. Dependent Variable: PE



Lampiran 11. Hasil Analisis Regresi Berganda

**Hasil Uji Linier Berganda**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	30.746	43.887	
	DBH	-1.220	0,243	-1.422
	DAU	0,533	0,229	0,557
	DAK	0,109	1.395	0,013

